

# WARTA PEMERIKSA

EDISI 9 ■ VOL. V ■ SEPTEMBER 2022



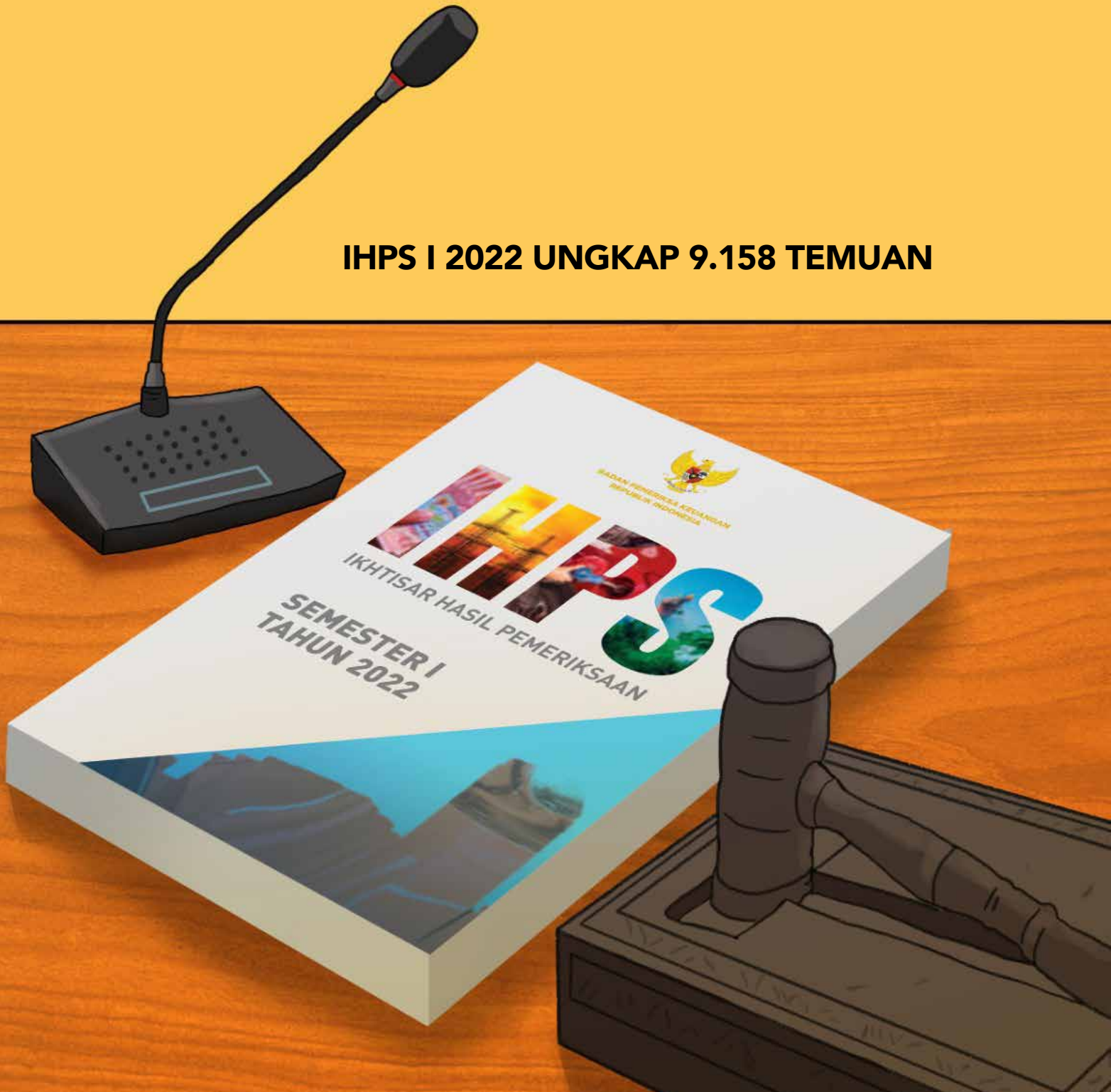
**G20** INDONESIA  
2022



**SAI20**  
INDONESIA  
2022



## IHPS I 2022 UNGKAP 9.158 TEMUAN



**7**

Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Kurang Efektif

**16**

Memeriksa LPJ Banparpol

**24**

India Berkomitmen Lanjutkan SAI20 yang Diinisiasi BPK



**H**asil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 yang telah resmi dipublikasikan menjadi isu utama yang disampaikan oleh *Warta Pemeriksa* edisi ini. Seperti disampaikan dalam rubrik Sorotan, laporan pemeriksaan enam bulanan ini telah disampaikan kepada pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/10).

Dalam kesempatan itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan bahwa IHPS I 2022 mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan sebesar Rp18,37 triliun. Laporan ini juga memuat ringkasan dari 771 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 682 LHP keuangan, 41 LHP kinerja, dan 48 LHP dengan tujuan tertentu (DTT).

Ketua BPK Isma Yatun menjelaskan, sebanyak 51,8 persen atau 8.116 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp17,33 triliun. Kemudian 44,8 persen, atau 7.020 dari permasalahan tersebut berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Lalu 3,4% atau 538 permasalahan terkait ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1,04 triliun.

Dalam rubrik BPK Bekerja, redaksi juga menyampaikan laporan mengenai tiga pemeriksaan atas infrastruktur ketenagalistrikan pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pemeriksaan tersebut terkait pengelolaan *independent power producer* (IPP), pengelolaan jaringan transmisi, serta perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik.

Hasil pemeriksaan pada tiga objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan infrastruktur ketenagalistrikan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Hasil pemeriksaan mengungkap 18 temuan yang memuat 41 permasalahan.

Sementara di rubrik Sharing Knowledge, redaksi melaporkan mengenai webinar mengenai Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik (LPJ Banparpol). Webinar ini digelar karena terkait latar belakang panduan pemeriksaan yang sudah disusun sejak 2017 dan disertai suplemen pemeriksaan yang terbit sejak 2019.

Litbang BPK menilai bahwa tema ini tepat sebagai pengetahuan atas pemeriksaan LPJ Banparpol dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan pemeriksa. Ini menjadi bagian dari suplemen untuk mengantisipasi apa saja yang ada di dalam pemeriksaan LPJ Banparpol.

Redaksi juga masih melanjutkan laporan mengenai Supreme Audit Institution 20 (SAI20). Sebelumnya, BPK telah sukses menuntaskan rangkaian pertemuan SAI20. Berbagai kegiatan telah dijalankan, mulai dari *technical meeting* hingga penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) sebagai puncaknya di Nusa Dua, Bali pada 29-30 Agustus 2022.

Rangkaian kegiatan SAI20 pun masih menjadi bahasan *Warta Pemeriksa* edisi September 2022. Kali ini, redaksi mengulas mengenai orang-orang yang berada di belakang layar atas keberhasilan penyelenggaraan acara bertaraf internasional ini.

Untuk kegiatan SAI20, BPK membentuk tim Project Management (PM) untuk menangani pelaksanaan pertemuan SAI20. Hampir seluruh satuan kerja di BPK terlibat dalam Project Management SAI20. Tiap perwakilan satuan kerja bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal demi suksesnya perhelatan SAI20.

Masih banyak laporan lain yang redaksi siapkan dalam *Warta Pemeriksa* edisi September 2022 ini. Selamat menikmati. ●

---

## TIM EDITORIAL

### Pengarah

Isma Yatun  
Agus Joko Pramono  
Bahtiar Arif

### Penanggung Jawab

R. Yudi Ramdan Budiman

### Ketua Tim Redaksi

R. Yudi Ramdan Budiman

### Kepala Sekretariat

Bestantia Indraswati

### Sekretariat

Bambang Supriedi  
Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi  
Sutriono  
Klara Ransingin  
Ridha Sukma  
Sigit Rais  
Frenny Artiningrum S.  
Apriyana  
Sudarman

### Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI  
Jalan Gatot Subroto no 31  
Jakarta  
Telepon: 021-25549000  
Pesawat 1188/1187  
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id  
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh  
Sekretariat Jenderal  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

---

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/ barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)



## 4 IHPS I 2022 UNGKAP 9.158 TEMUAN

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/ atau penyerahan aset sebesar Rp2,41 triliun atau 13,9 persen dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp17,33 triliun.

- 7 UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH KURANG EFEKTIF
- 10 CAPAIAN OPINI WTP LAMPAUI TARGET RPJMN
- 12 BPK UNGKAP PLN TERIMA DANA KOMPENSASI LEBIH BESAR RP1,2 TRILIUN
- 16 MEMERIKSA LPJ BANPARPOL



## 20 MENGAWAL TRANSFORMASI DIGITAL

SAI20 menyerukan kepada pemerintah G20 untuk memastikan bahwa laju digitalisasi yang cepat tidak membuat ada pihak-pihak yang tertinggal.

- 22 BERKOLABORASI MENYUKSESKAN SAI20
- 24 INDIA BERKOMITMEN LANJUTKAN SAI20 YANG DIINISIASI BPK
- 26 AKHMAD ANANG HERNADY, KEPALA DITAMA BINBANGKUM 'MEMPERKUAT ASPEK HUKUM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA'
- 31 BPK BAGIKAN INFORMASI SOAL PEMERIKSAAN IAEA KE CAG INDIA
- 32 BPK DAN BAI KOREA LAKUKAN PEMBARUAN KERJA SAMA
- 34 AJIEP PADINDANG, KETUA BADAN AKUNTABILITAS PUBLIK (BAP) DPD RI 'SELALU LAKUKAN PEMERIKSAAN KINERJA'
- 36 WAHYU SANJAYA, KETUA BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN) 'PERTAJAM REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK'
- 40 MENGHIDUPKAN KEMBALI DAYCARE BPK BENGKULU PASCA PANDEMI
- 44 KISAH BPK SULBAR BANGKIT DARI MUSIBAH GEMPA
- 48 MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS
- 52 BERITA FOTO



## IHPS I 2022 UNGKAP 9.158 TEMUAN

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp2,41 triliun atau 13,9 persen dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp17,33 triliun.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/10). Dalam kesempatan itu, BPK menyampaikan bahwa IHPS I 2022 mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan sebesar Rp18,37 triliun.

"IHPS I tahun 2022 yang disampaikan ini memuat ringkasan dari 771 laporan hasil pemeriksaan (atau LHP), yang terdiri atas 682 LHP keuangan, 41 LHP kinerja, dan 48 LHP dengan tujuan tertentu (DTT)," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam pidatonya.

Dia menjelaskan, sebanyak 51,8 persen atau 8.116 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan)

sebesar Rp17,33 triliun. Kemudian 44,8 persen atau 7.020 dari permasalahan tersebut berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Lalu 3,4% atau 538 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1,04 triliun.

Permasalahan ketidakpatuhan di IHPS ini terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 5.465 permasalahan sebesar Rp17,33 triliun. Kemudian ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak 2.651 permasalahan.

"Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp2,41 triliun, atau 13,9 persen dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp17,33 triliun," ungkap Isma.



■ Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/10).



■ Ketua BPK Isma Yaton



**IHPS I tahun 2022 yang disampaikan ini memuat ringkasan dari 771 laporan hasil pemeriksaan (atau LHP), yang terdiri atas 682 LHP keuangan, 41 LHP kinerja, dan 48 LHP dengan tujuan tertentu (DTT).**

Selanjutnya, kata dia, terkait dengan permasalahan 3E, sebanyak 53 permasalahan sebesar Rp787,90 miliar merupakan ketidakhematan. Tujuh permasalahan merupakan ketidakefisienan dan 478 permasalahan sebesar Rp257,90 miliar merupakan ketidakefektifan.

IHPS I 2022 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-semester I 2022 dengan status yang telah ditetapkan sebesar Rp4,56 triliun. Tingkat penyelesaian menunjukkan bahwa telah dilakukan pelunasan sebesar Rp2,26 triliun.

Kemudian dalam proses angsuran sebesar Rp365,22 miliar dan penghapusan sebesar Rp84,68 miliar.

“Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,84 triliun atau 40 persen dari total kasus kerugian negara/daerah,” ujar Isma.

Laporan keuangan badan lainnya tahun 2021 yang juga diperiksa oleh BPK, yaitu LK

tahunan Bank Indonesia. Kemudian LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji.

IHPS I tahun 2022 ini juga memuat 41 hasil pemeriksaan kinerja, antara lain pemeriksaan atas efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan di wilayah Jabodetabek. Lalu, BPK melakukan pemeriksaan atas upaya pemda untuk menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan di 34 pemerintah provinsi di Indonesia.

IHPS I Tahun 2022 turut memuat 48 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Antara lain pemeriksaan atas belanja barang dan pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik/*public service obligation* (KPP/PSO).

### Rekomendasi pemeriksaan

Sejak tahun 2005 hingga Semester I 2022, BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa dengan nilai rekomendasi sebesar Rp302,56 triliun.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan sebanyak 77,3 persen atau 511.380 rekomendasi sebesar Rp148,19 triliun telah sesuai, 17,1 persen atau 112.757 rekomendasi sebesar Rp111,43 triliun belum sesuai, 4,5 persen atau 29.835 rekomendasi sebesar Rp19,60 triliun belum ditindaklanjuti, dan 1,1 persen atau 6.922 rekomendasi sebesar Rp23,34 triliun tidak dapat ditindaklanjuti.



Pada kesempatan yang baik ini, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR atas sinergi dan kerja sama yang baik dengan BPK. Terlebih dalam rangka mengimplementasikan *good governance* bagi Indonesia yang kita cintai. Semoga, kolaborasi antara DPR dan BPK terjalin kian kuat dan solid pada masa mendatang.

Secara kumulatif hingga Semester I 2022, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan sebesar Rp124,60 triliun.

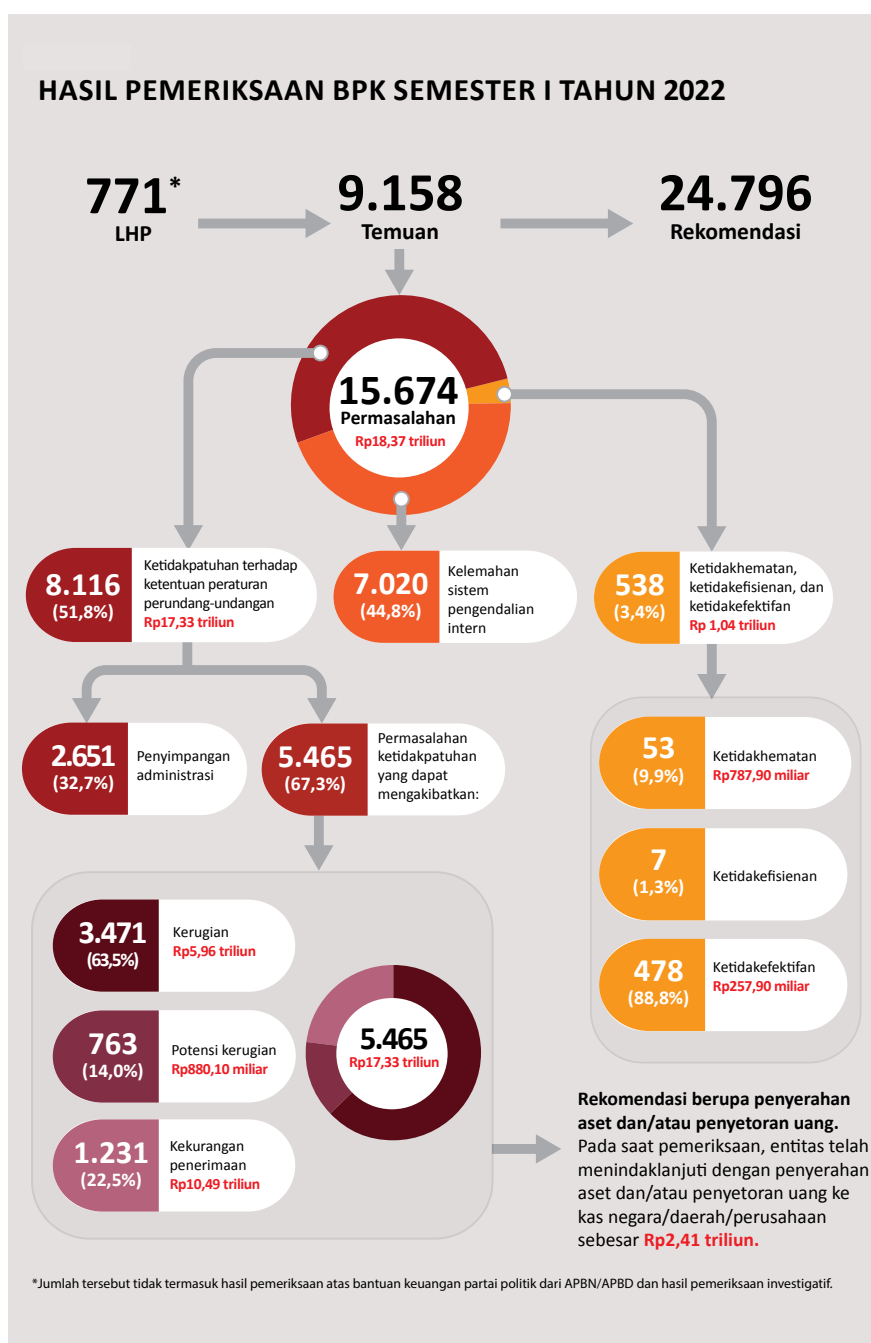
Capaian tersebut menunjukkan manfaat hasil pemeriksaan BPK yang dapat diukur dengan uang sekaligus perwujudan komitmen entitas untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan *accountable* untuk mencapai tujuan bernegara.

Dalam pidatonya, Isma juga menyampaikan rasa syukur bahwa pada tahun ini Indonesia mendapatkan amanat Presidensi Group of 20 (G20). Terkait dengan presidensi yang mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger" itu, BPK berinisiatif untuk membentuk *engagement group* baru, yakni Supreme Audit Institution 20 (SAI20).

SAI20 merupakan kelompok SAI negara-negara G20. Tujuannya untuk mendorong kolaborasi melalui berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di antara SAI negara-negara G20 serta pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mendorong tata kelola yang akuntabel.

Dia pun berharap SAI20 dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan G20. Khususnya terhadap program-program percepatan pemulihan ekonomi dan pencapaian target-target SDGs.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR atas sinergi dan kerja sama yang baik dengan BPK. Terlebih dalam rangka mengimplementasikan *good governance* bagi Indonesia yang kita cintai. Semoga, kolaborasi antara DPR dan BPK terjalin kian kuat dan solid pada masa mendatang," kata Isma. ●





## UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH KURANG EFEKTIF

Pemeriksaan kinerja terkait upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan dilaksanakan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia.



■ Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di DPD, Jakarta, Jumat (7/10).

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 turut memuat hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan terhadap pemerintah daerah. Beberapa pemeriksaan kinerja yang dilakukan, antara lain, mengenai upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan serta pemeriksaan kinerja di bidang pendidikan.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun saat menyerahkan IHPS I 2022 kepada DPD RI pada 7 Oktober 2022 menyampaikan, IHPS I 2022 secara keseluruhan memuat 41 hasil pemeriksaan kinerja, yang terdiri atas satu objek pemeriksaan pemerintah pusat, 35 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan lima objek pemeriksaan BUMN. Pemeriksaan kinerja yang dilakukan berkaitan dengan tiga tema prioritas nasional, yakni Penguatan ketahanan ekonomi, Pembangunan sumber daya manusia, dan Penguatan infrastruktur.

“Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah antara lain pemeriksaan atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan TA 2021 yang dilaksanakan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK mengungkapkan, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya yang dilaksanakan pemprov kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini karena masih terdapat beberapa masalah signifikan pada aspek kebijakan, pelaksanaan kegiatan/subkegiatan dan pemberdayaan masyarakat.

Terkait kebijakan upaya penanggulangan kemiskinan, masih terdapat pemprov yang belum menyusun atau menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan. Selain itu, pemprov belum optimal mengoordinasikan kebijakan dengan pemerintah kabupaten/kota, serta antar satuan kerja terkait di bawah kendali pemprov dan institusi lain.

“Adapun mengenai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, masih terdapat pemprov yang belum melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat, serta belum melaksanakan monitoring dan evaluasi secara memadai,” ujar Ketua BPK.

Ada sejumlah rekomendasi yang disampaikan BPK kepada gubernur terkait temuan tersebut. Pertama, menyusun RPKD dan RAT secara lengkap dan tepat waktu. Kedua, menetapkan dan menerapkan mekanisme koordinasi perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah dengan pemerintah kabupaten/kota, dan antar perangkat daerah serta institusi terkait di wilayahnya.

“Rekomendasi selanjutnya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan,” kata Ketua BPK.

Pemeriksaan kinerja juga dilakukan di sektor pendidikan. BPK melakukan pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahun Anggaran (TA) 2020-2021 yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya di Jakarta.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta, dapat menghambat efektivitas pengelolaan program KJP Plus dan KJMU. Permasalahan tersebut, antara lain, regulasi dan proses pendataan calon penerima KJP Plus dan KJMU belum sepenuhnya menghasilkan data yang valid.

BPK juga menemukan bahwa pendistribusian kartu dan/atau buku tabungan kepada penerima KJP Plus dan KJMU belum sepenuhnya tepat waktu. Permasalahan ini mengakibatkan adanya dana KJP Plus dan KJMU yang mengendap pada rekening penerima sebesar Rp112,29 miliar yang berisiko disalahgunakan. Adapun permasalahan lainnya, penyaluran dana KJP Plus dan KJMU belum seluruhnya tepat waktu sebesar Rp103,89 miliar. Dana tersebut terdiri atas dana yang belum sepenuhnya diterima pada periode manfaat yang tepat sebesar Rp20,92 miliar, dan dana yang mengendap pada rekening penampungan (*escrow account*) tahun 2013-2021 senilai Rp82,97 miliar.

Terkait permasalahan itu, BPK merekomendasikan Gubernur Provinsi DKI



## DPD RI melalui Komite IV dan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK kepada pemerintah daerah.

Jakarta untuk menyempurnakan Pergub dan/atau Juknis terkait KJP Plus dan KJMU, yang antara lain, mengatur pendataan calon penerima KJP Plus melibatkan satuan pendidikan dalam menjaring dan mengusulkan calon penerima KJP Plus.

Rekomendasi selanjutnya, memerintahkan kepada Direktur Utama PT Bank DKI agar meningkatkan pelayanan dalam pendistribusian kartu ATM dan/atau buku tabungan sehingga mendekatkan layanan kepada penerima bantuan dan lebih fleksibel waktu layanannya. “Juga menunjuk petugas khusus yang melakukan monitoring atas penyaluran dana KJP Plus dan KJMU oleh PT Bank DKI, sehingga dapat diketahui secara rinci dana yang belum disalurkan (*data by name*),” kata Ketua BPK.

### Opini LKPD

Ketua BPK menyampaikan, BPK sepanjang semester I 2022 telah memeriksa 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 dari 542 Pemda. Dari 541 Pemda, sebanyak 500 Pemda memperoleh opini WTP (92,4 persen), 38 Pemda memperoleh opini WDP (7 persen), dan tiga Pemda memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (0,6 persen).

Berdasarkan tingkat pemerintahan, LK pemerintah provinsi yang memperoleh opini WTP sebanyak 34 dari 34 LK (100 persen), LK pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP sebanyak 377 dari 414 LK (91 persen), dan LK pemerintah kota yang memperoleh opini WTP sebanyak 89 dari 93 LK (96 persen).

“Capaian opini tersebut telah melampaui target RPJMN 2020-2024 untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing sebesar 92 persen, 80 persen, dan 92 persen di tahun 2021,” ujar Ketua BPK.

Ketua BPK mengungkapkan, sebanyak 41 LKPD belum memperoleh opini WTP karena





terdapat permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Salah satu permasalahan itu mengenai akun aset tetap. Ketua BPK menyampaikan, pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan atau tidak akurat, serta biaya renovasi, rehabilitasi, dan biaya lain setelah perolehan aset tetap belum dikapitalisasi ke aset tetap induknya.

Permasalahan juga terdapat pada akun belanja modal. Terdapat kelebihan pembayaran belanja modal yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, pekerjaan tidak dilaksanakan, pembayaran melebihi prestasi pekerjaan dan indikasi pemahalan harga. Kelebihan pembayaran tersebut belum dipulihkan dengan penyeteroran ke kas daerah, serta realisasi belanja modal tanah atas ganti rugi lahan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.

### Siap menindaklanjuti

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, DPD RI melalui Komite IV dan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang

disampaikan BPK kepada pemerintah daerah.

"Kami akan pelajari dan kami tindaklanjuti melalui Komite IV dan BAP DPD RI," kata LaNyalla, seperti dikutip dari website resmi DPD.

LaNyalla menambahkan, dari berbagai laporan dan catatan yang telah disampaikan oleh Ketua BPK RI, dirinya akan meminta seluruh Anggota dan Alat Kelengkapan DPD RI menjadikan laporan BPK sebagai bahan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. "Ini bisa menjadi bahan bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, demi perbaikan dan terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel," tuturnya.

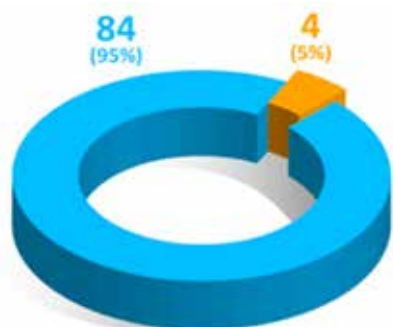
LaNyalla mengatakan, BPK RI juga sedang melakukan audit kinerja DPD RI atas penilaian terhadap kinerja lembaga. Audit ini baru pertama kali dilakukan dan DPD RI akan menjadi yang pertama di lingkungan lembaga negara.

"Audit ini upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas kinerja suatu lembaga negara. Maka Pimpinan DPD RI mengimbau agar kita (DPD RI) dapat menyampaikan informasi sesuai dengan ketentuan dalam rangka optimalisasi kinerja lembaga," kata LaNyalla. ●

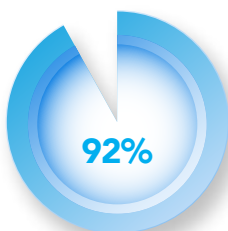
## CAPAIAN OPINI WTP LAMPAUI TARGET RPJMN

Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus mengalami peningkatan. Bahkan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKKL dan LKPD telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Berikut infografis capaian opini WTP LKLL dan LKPD tahun 2021 yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2022.

### 1 OPINI ATAS LKKL DAN LKBUN TAHUN 2021



● WTP ● WDP  
Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2021

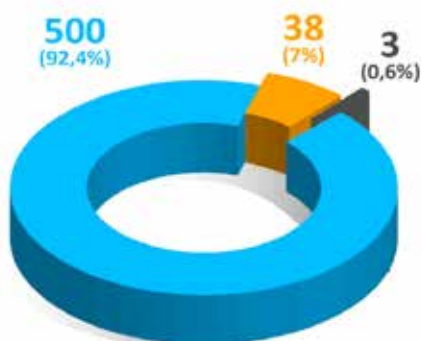


Target Capaian Opini WTP LKKL dalam RPJMN 2020-2024



Capaian Opini WTP LKKL Tahun 2021

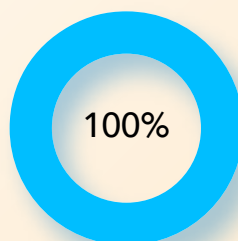
### 2 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



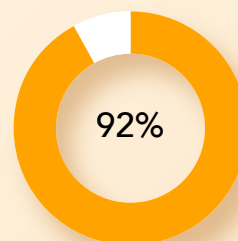
● WTP ● WDP ● TMP

### Capaian Opini WTP Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

#### PEMERINTAH PROVINSI

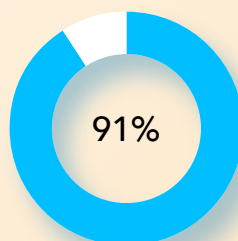


34 entitas

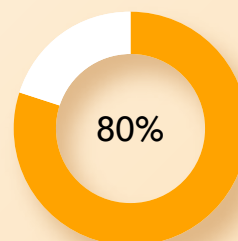


Target RPJMN

#### PEMERINTAH KABUPATEN

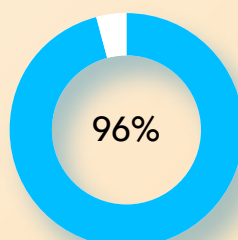


377 dari 414 entitas

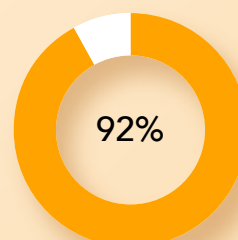


Target RPJMN

#### PEMERINTAH KOTA



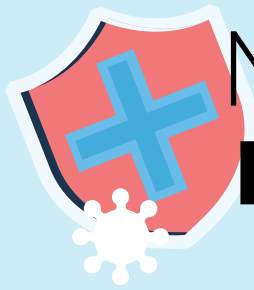
89 dari 93 entitas



Target RPJMN

Jumlah LKPD yang belum meraih opini WTP: **41 entitas**

Sumber: IHPS I 2022



# Meningkatkan Imunitas Tubuh

Berjemur setiap hari selama 10-15 menit sebelum jam 9 pagi dan/atau setelah jam 3 sore.

1



Olahraga dengan intensitas ringan/sedang.

Menghindari rokok dan minuman beralkohol.



5

Batasi berita tentang pandemi.

2

Konseling *online* dengan psikolog atau dokter kesehatan jiwa apabila cemas dan stres mengganggu.



Meditasi dan tidur yang cukup.

6

3

Interaksi virtual dengan keluarga dan teman.



Beraktivitas seperti biasa di ruang isolasi mandiri.



7

4



## Tunda Olahraga Jika :

1. Sesak napas dengan saturasi oksigen <95% saat istirahat.
2. Demam selama 2 hari terakhir.
3. Nyeri dada, nyeri kepala.
4. Batuk terus menerus.





## BPK UNGKAP PLN TERIMA DANA KOMPENSASI LEBIH BESAR RP1,2 TRILIUN

PLN kehilangan kesempatan untuk menghemat biaya pokok penyediaan tenaga listrik tahun 2020 sebesar Rp4,52 triliun.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan tiga pemeriksaan atas infrastruktur ketenagalistrikan pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pemeriksaan tersebut terkait pengelolaan *independent power producer* (IPP), pengelolaan jaringan transmisi, serta perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik.

Hasil pemeriksaan pada tiga objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan infrastruktur ketenagalistrikan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 41 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 20 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), sembilan ketidakpatuhan sebesar Rp1,23 triliun, dan 12 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) sebesar Rp53,30 miliar. Salah satu temuan yang diungkap BPK berkaitan dengan penyesuaian tarif tenaga listrik yang mengakibatkan PLN menerima dana kompensasi dari pemerintah lebih besar Rp1,2 triliun.

Terkait pengelolaan IPP, BPK menemukan permasalahan dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan IPP pada 2016 hingga semester I 2020 pada PT PLN dan instansi terkait lainnya. Permasalahan tersebut antara lain dalam penetapan kapasitas pembangkit IPP, PLN belum memperhatikan kemampuan keuangan dan rencana investasi sesuai tata kelola perusahaan yang baik.

Hal ini mengakibatkan PLN tidak dapat mengukur kewajaran dan efektivitas investasi PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) melalui PT PJB Investasi (PJB I) pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, serta timbulnya risiko kehilangan investasi tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PLN agar melakukan reviu dan evaluasi terhadap efektivitas investasi yang telah dilakukan oleh PJB I pada PLTA Batang Toru, serta menyusun langkah-langkah strategis yang konkret untuk memitigasi risiko dalam investasi tersebut.

Dalam pengadaan IPP dan konstruksi pembangkit IPP, PLN menentukan tarif pembelian tenaga listrik tidak menggunakan referensi paling mutakhir dan tidak mengevaluasi berdasarkan kondisi riil, serta tidak mempertimbangkan status lahan aset IPP pascamas kontrak. Hal ini mengakibatkan potensi ketidakhematan biaya pokok penyediaan tenaga listrik PLN dan salah satunya dapat membebani subsidi listrik yang dibayarkan oleh pemerintah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PLN menginstruksikan Executive Vice President (EVP) IPP serta pejabat terkait lainnya untuk mengevaluasi kewajaran tarif pembelian tenaga listrik IPP dan selanjutnya menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut secara optimal yang paling menguntungkan PLN. Termasuk juga mengkomunikasikan/konsultasi penyesuaian harga pembelian tenaga listrik dalam kontrak IPP terkait dengan mempertimbangkan status kepemilikan lahan, nilai residu, dan biaya investasi riil pembangkit.

Dalam operasi pembangkit IPP, PLN belum optimal melakukan upaya penurunan tarif dan mitigasi risiko penyerapan tenaga listrik di bawah batas minimum dalam skema *take or pay* untuk memperbaiki biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Hal ini mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan untuk menghemat biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada 2020 sebesar Rp4,52 triliun dari upaya penurunan tarif pembelian tenaga listrik. Selain itu, PT PLN kehilangan kesempatan untuk menghemat biaya pokok penyediaan tenaga listrik dari *make up* energi listrik pada 2020.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PLN menyusun pedoman terkait penentuan tarif tenaga listrik secara umum, termasuk untuk pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT), untuk keperluan di masa mendatang, dan menginstruksikan EVP IPP dan EVP Perencanaan Sistem lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP sebelumnya. Hal itu yakni mengupayakan *energy make up* untuk memanfaatkan energi yang tidak terserap dalam skema *take or pay* kontrak pembelian listrik IPP.



**Dalam operasi pembangkit IPP, PLN belum optimal melakukan upaya penurunan tarif dan mitigasi risiko penyerapan tenaga listrik di bawah batas minimum dalam skema *take or pay* untuk memperbaiki biaya pokok penyediaan tenaga listrik.**

### **Pengelolaan jaringan transmisi**

Pada semester I 2022, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pengelolaan jaringan transmisi pada 2017 hingga semester I 2021 pada PT PLN dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan jaringan transmisi tersebut telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan.

Permasalahan yang ditemukan antara lain, dalam perencanaan jaringan transmisi, PLN belum menyusun rencana yang adaptif terhadap perubahan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan rencana kontingensi untuk memitigasi gangguan keandalan jaringan transmisi sebagai dampak perubahan tersebut.

Hal ini mengakibatkan antara lain keandalan jaringan transmisi tenaga listrik pada area pekerjaan Gardu Induk (GI) 150 KV Kentungan II, GI 150 KV Kudus II, GI 150 KV Brebes II, dan *gas insulated switchgear* (GIS) Bengkok Baru/Dago II berpotensi tidak terpenuhi dan terjadi peningkatan risiko gangguan kontinuitas penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PLN agar memerintahkan EVP Perencanaan dan Pengendalian di masing-masing regional Jawa, Madura, dan Bali bersama divisi konstruksi terkait untuk menyusun rencana kerja yang adaptif terhadap RUPTL terkait penyelesaian pekerjaan jaringan transmisi tenaga listrik yang masih terkendala. Selain itu, BPK juga meminta PLN untuk menyusun rencana kontingensi untuk memitigasi gangguan keandalan jaringan transmisi tenaga listrik sebelum pekerjaan jaringan transmisi tenaga listrik yang terkendala tersebut dapat beroperasi.



pln.co.id

Dalam pengadaan jaringan transmisi, PLN juga belum optimal melaksanakan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) pembangunan infrastruktur jaringan transmisi untuk menghasilkan harga yang paling menguntungkan. Hal tersebut mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan memperoleh harga pengadaan yang lebih murah, minimal sebesar Rp53,30 miliar dalam pembangunan infrastruktur jaringan transmisi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PLN menyusun peraturan internal dan *database* referensi harga yang cukup sebagai pedoman Unit Induk Pembangunan (UIP) maupun unit lainnya di PLN dalam melaksanakan setiap tahapan pengadaan barang dan jasa, khususnya terkait infrastruktur jaringan transmisi. Selain itu, direksi PLN agar memerintahkan EVP Konstruksi untuk memastikan masing-masing UIP PLN telah memperoleh dan menggunakan referensi harga yang paling ekonomis dan efisien.

Dalam konstruksi jaringan transmisi, PLN belum sepenuhnya menyelesaikan pembangunan gardu induk secara sinkron dengan penyelesaian jalur transmisi dan pembangkit terkait. Hal ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur jaringan transmisi belum efektif mencapai tujuan untuk menurunkan susut jaringan dan biaya pokok penyediaan tenaga listrik serta meningkatkan keandalan sistem jaringan transmisi, khususnya di wilayah Sumatera, Jawa, Madura, Sulawesi, Kalimantan, dan bahkan menghadapi risiko pemadaman saat beban puncak kelistrikan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PLN agar memerintahkan EVP Konstruksi terkait untuk mengevaluasi ketidak-sinkronan penyelesaian infrastruktur jaringan transmisi beserta dampak dan/atau risikonya.

Kemudian, PLN perlu menyusun rencana strategis yang detail berdasarkan hasil evaluasi guna mitigasi dampak dan/atau risiko ketidakandalan jaringan transmisi di wilayah yang memiliki penyelesaian infrastruktur yang tidak sinkron tersebut.

### Perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik

BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik tahun 2020 pada PT PLN dan instansi terkait lainnya. Lingkup pemeriksaan meliputi perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik oleh PLN pada 2020 untuk golongan pelanggan yang dilakukan penyesuaian tarif atau tarif tenaga listrik non-subsidi. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik tahun 2020 pada PLN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan.

Permasalahan tersebut yakni pemberlakuan penyesuaian tarif periode sebelumnya membebani keuangan negara. PLN belum berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait upaya rinci efisiensi operasional yang harus dilakukan oleh PLN untuk menindaklanjuti Surat Menteri ESDM dalam menghitung penyesuaian tarif tenaga listrik. Hal tersebut mengakibatkan PLN menerima dana kompensasi tenaga listrik dari pemerintah lebih besar Rp1,20 triliun.

BPK merekomendasikan direksi PLN agar melakukan koordinasi secara optimal dengan Kementerian ESDM terkait upaya rinci efisiensi operasional yang harus dilakukan oleh PLN untuk menindaklanjuti Surat Menteri ESDM. Selain itu, PLN perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penerimaan dana kompensasi penyesuaian tarif tenaga listrik yang lebih besar Rp1,20 triliun. Selain itu, juga menginstruksikan EVP Tarif dan Subsidi untuk menggunakan volume penjualan dan nilai realisasi pendapatan sesuai dengan kondisi riil.

BPK juga menemukan, PLN tidak menyesuaikan dan menerapkan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik dalam perhitungan penyesuaian tarif berdasarkan kondisi riil. Akibatnya, perhitungan penyesuaian tarif tidak sepenuhnya dilakukan secara akurat. BPK merekomendasikan direksi PT PLN agar memerintahkan EVP Tarif dan Subsidi untuk melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian ESDM terhadap penerapan BPP tenaga listrik dan formula penyesuaian tarif secara keseluruhan sehingga mencerminkan biaya dan tarif riil. ●



# Protokol Isoman

## Ada kamar terpisah

- Usahakan kamar memiliki jendela yang dapat dibuka & sirkulasi udara lancar.
- Pasien tidak perlu memakai masker selama di kamar.

## Tidak ada kamar terpisah

- Usahakan tidak kontak langsung dengan keluarga dan selalu memakai masker.
- Gunakan masker ganda (masker bedah di bagian dalam dan masker kain di luar).
- Area yang dilalui pasien dapat langsung disemprot dengan disinfektan aerosol.

## Penanganan ruangan

- Semprot ruangan dengan disinfektan aerosol agar daya tebaranya lebih luas.
- Simpan peralatan mandi pasien, seperti sikat gigi dan sabun di ruangan terpisah.
- Bersihkan permukaan benda yang sering disentuh oleh pasien dengan disinfektan.
- Semprot, tutup, dan diamkan kamar mandi 15-30 menit sebelum dipakai kembali.

## Penanganan pakaian

Cuci pakaian secara terpisah dari pakaian anggota keluarga lainnya.

Gunakan deterjen.

Bila perlu gunakan air hangat.

Cuci tangan dengan sabun setelah mencuci.



## Penanganan sampah

Sampah infeksius dikumpulkan dalam satu kantong plastik pada tempat sampah tertutup dan ditandai "limbah infeksius". Sampah tidak perlu dibakar.

Bersihkan tempat sampah dengan disinfektan sebelum diisi kantong sampah baru.





## MEMERIKSA LPJ BANPARPOL

BPK telah menyiapkan aplikasi SiAP Banparpol untuk memudahkan proses pemeriksaan atas LPJ Banparpol.

**D**irektorat Penelitian dan Pengembangan BPK menggelar webinar bertajuk Komunitas Litbang Live Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik (LPJ Banparpol). Webinar ini digelar karena terkait latar belakang panduan pemeriksaan yang sudah disusun sejak 2017 dan disertai suplemen pemeriksaan yang terbit sejak 2019.

“Litbang BPK menilai tema ini tepat karena sebagai pengetahuan atas pemeriksaan LPJ Banparpol dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan teman-teman pemeriksa. Ini menjadi bagian dari suplemen untuk mengantisipasi apa saja yang ada di dalam pemeriksaan LPJ Banparpol,” kata Kepala Direktorat Litbang BPK Selvia Vivi Devianti saat membuka webinar Komunitas Litbang Live, belum lama ini. Webinar ini turut menghadirkan narasumber dari tim Subdit Litbang PDDT BPK, yaitu Oktarika Ayoe Shanda, Nugroho, dan Wahyu Prabowo Aji.



**Ketika memeriksa Banparpol, satu tim sekali turun dalam 5 hari, rata-rata bisa memegang 10 sampai 12 LPJ parpol. Nah kesalahan-kesalahan redaksional menjadi hal yang paling sering muncul pada saat itu.**



Vivi mengatakan, dengan begitu banyaknya partai politik saat ini, para pemeriksa kemungkinan akan kesulitan mengompilasi pemeriksaan LPJ Banparpol. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan LPJ Banparpol, BPK juga telah menyiapkan aplikasi SiAP Banparpol untuk memudahkan pemeriksaan. "Kita tahu di Indonesia, di era orde baru, partai politik hanya empat partai politik besar, kemudian sekarang partai politik banyak. Untuk LPJ-nya Banparpol ini belum ada di pusat, di daerah, otomatis ini sangat besar sekali jumlahnya. Untuk itu, bagaimana para pemeriksa mengkompilasi seluruh hasil pemeriksaan LPJ banparpol ini. Untuk itu dipersiapkan aplikasi yang disusun di 2018 hingga 2019," ucap Vivi.

Dia menambahkan, BPK saat ini sedang merevisi panduan pemeriksaan LPJ Banparpol. Hal ini untuk mengakomodasi perubahan peraturan dari Permendagri Nomor 36 tahun 2018 yang menjadi Permendagri 78 tahun 2021 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Perubahan ini, tutur dia, salah satunya terkait penggunaan dana untuk banparpol dalam penanganan Covid-19. Revisi juga dilakukan untuk merespons terbitnya sejumlah petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan 2018.

Tim dari Litbang PDDT BPK, Oktarika Ayoe Shanda, mengatakan, kewajiban BPK menggelar pemeriksaan LPJ Banparpol diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. BPK pun mengeluarkan panduan untuk pemeriksaan berdasarkan Permendagri yang dua kali mengalami perubahan. Sementara di 2018, BPK membuat suplemen panduan LPJ Banparpol untuk mengakomodasi perubahan Permendagri yang terjadi.

"Dengan segala kondisi yang ada, kita mengesampingkan hari ini atas kontroversi yang terjadi atas pemeriksaan Banparpol, tapi kita harus jalan karena UU sudah mewajibkan, maka kita buatlah satu panduan di 2017 yang kemudian diubah di 2018 dan 2019," kata Ayoe.

Setelah panduan diluncurkan, pemeriksa di lapangan merasakan benar kebutuhan akan aplikasi untuk mempermudah prosesnya. "Kenapa dibutuhkan, karena waktu itu teman-teman pemeriksa menyampaikan kebutuhannya kepada kami. Ketika memeriksa Banparpol, satu tim sekali turun dalam 5 hari, rata-rata bisa memegang 10 sampai 12 LPJ parpol. Nah kesalahan-kesalahan redaksional menjadi hal yang paling sering muncul pada saat itu. Itu latar belakang pertama kita membuat SiAP DTT Banparpol," ucap dia.





# 1 PENGGUNAAN BANPARPOL

## Pendidikan Politik:

- ◆ Seminar
- ◆ Lokakarya
- ◆ Dialog interaktif
- ◆ Sarasehan
- ◆ Workshop
- ◆ Kegiatan pertemuan parpol lain sesuai tugas dan fungsi parpol
- ◆ Sosialisasi dan edukasi kebijakan prokes penanganan pandemi Covid-19
- ◆ Penyediaan perbekalan/alkes pencegahan pandemi Covid-19

## Kegiatan Operasional Sekretariat Parpol:

- ◆ Administrasi umum: ATK, rapat internal, perjalanan dinas, transport, pengadaan inventaris, sewa kantor, honor tenaga administrasi, penyediaan obat dan alkes pencegahan Covid-19.
- ◆ Lngganan daya dan Jasa: telepon, internet, listrik, air minum, pos dan giro, surat menyurat, media cetak dan elektronik.
- ◆ Pemeliharaan data dan arsip: penyimpanan data elektronik dan manual.
- ◆ Pemeliharaan peralatan kantor: pemeliharaan peralatan elektronik dan inventaris sekretariat.



# 2 HAL-HAL YANG DIUJI DALAM PEMERIKSAAN LPJ BANPARPOL

### 1. Tepat Rekening

Kesesuaian antara rekening kas umum parpol/rekening parpol dengan rekening yang digunakan untuk menerima transfer dana Banparpol.

### 2. Tepat Jumlah (diterima=dilaporkan)

Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang diterima oleh parpol dengan yang dilaporkan dalam LPJ.

### 3. Tepat Pertanggungjawaban

- ◆ LENGKAP  
Seluruh dana yang diterima didukung dengan bukti pertanggungjawaban.
- ◆ SAH  
Seluruh bukti pertanggungjawaban yang disampaikan harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah.

### 4. Tepat Prioritas

Dana banparpol yang didukung dengan bukti yang sah lebih banyak digunakan untuk kegiatan pendidikan politik daripada kegiatan operasional sekretariat parpol.

Sumber: Direktorat Litbang BPK

## Temuan Pemeriksaan

- 01 Kondisi
- 02 Kriteria
- 03 Akibat

- SEBAB opsional tergantung kedalaman pengujian
- Pemberian REKOMENDASI bersifat opsional/tidak wajib (mengacu pada SPKN par. A13)

### MATERIALITAS

Sesuatu bersifat material jika pengetahuan mengenai hal tsb mempengaruhi pengambilan keputusan

Oleh karena itu, kata dia, sangat sayang apabila SiAP hanya jadi aplikasi yang menekan kesalahan redaksional. Sehingga, aplikasi ini wajib memiliki nilai lebih, di mana pengejawantahannya berupa aplikasi berbasis AI pertama yang ada di BPK. “Kalau SiAP yang lain rata-rata hanya meng-*capture* prosedur, tapi kalau SiAP di banparpol kita sudah siapkan logika berpikir di dalam si aplikasi. Tapi memang, pemeriksanya cukup sederhana. Kriterianya pun boleh dibilang sederhana,” ucap dia.

Narasumber lainnya dari Subdit Litbang PDTT BPK, Nugroho, menjelaskan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2011 mengamanahkan BPK untuk menggelar pemeriksaan LPJ Banparpol, dimana konsekuensinya meski di satu sisi ada pemeriksaan yang nilainya kecil, namun BPK harus mengawal penggunaan keuangan negara.

Terkait korupsi, ia menyebut hingga kini belum ada kajian bahwa pemberian atau penambahan nilai Banparpol berimplikasi terhadap korupsi partai politik. Namun berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan penambahan nilai banparpol, berko-

relasi dengan penekanan nilai korupsi oleh kader-kader partai politik.

“Pemerintah berencana menaikkan nilai Banparpol tadi dengan dasar studi BRIN, bahwa ada berkurangnya korupsi kader parpol dengan pemenuhan kebutuhan parpol oleh pemerintah, pasti ada syaratnya. Syaratnya adalah mereka harus punya satu sistem pengendalian. Mereka membangun sendiri yang namanya SIPP (Sistem Integritas Partai Politik),” ucap dia.

Sementara, Wahyu Prabowo Aji menjelaskan bahwa alokasi Banparpol berubah sesuai aturan yang menyertainya. PP Nomor 5 tahun 2009 mengatur bahwa alokasi Banparpol sebesar Rp180 per suara dan kemudian naik menjadi Rp1.000-Rp1.200 sesuai PP Nomor 1 Tahun 2018.

Hanya saja, berdasarkan kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), partai politik membutuhkan Rp16.922 per suara untuk operasionalnya. Sementara, pemerintah akan menanggung sekitar Rp8.461 per suara. Rencana pemerintah menaikkan alokasi Banparpol ini, menurut Wahyu, akan menjadi tantangan bagi pemeriksa BPK.

Dengan alokasi sumber daya yang terbatas, pemeriksa diwajibkan memeriksa anggaran yang semakin lama membesar. Tantangan lainnya adalah soal waktu, dimana pemeriksaan berbarengan dengan audit laporan keuangan lainnya, termasuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. ●

## MENGAWAL TRANSFORMASI DIGITAL

SAI20 menyerukan kepada pemerintah G20 untuk memastikan bahwa laju digitalisasi yang cepat tidak membuat ada pihak-pihak yang tertinggal.

**P**ercepatan transformasi digital tidak hanya membutuhkan kesiapan infrastruktur. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) atau masyarakat dalam menyambut digitalisasi, menjadi faktor yang tak kalah penting. Secanggih dan semahal apapun infrastruktur yang dibangun, program transformasi digital tak akan bisa berjalan maksimal jika masyarakat belum siap memanfaatkannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen yang besar untuk mendorong transformasi digital. Bahkan, BPK turut mengangkat isu transformasi digital dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Supreme Audit Institution 20 (SAI20) atau lembaga pemeriksa negara anggota G20.

KTT SAI20 yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus, menghasilkan 12 poin komunique yang di dalamnya juga terdapat mengenai transformasi digital.

"SAI20 memiliki komitmen untuk bersama-sama mengawal transformasi digital. Kita akan saling bertukar informasi dan pengetahuan tentang audit mengenai transformasi digital," kata Pimpinan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi yang juga menjadi Ketua Delegasi KTT SAI20.

Terkait komunique SAI20, isu transformasi digital tercantum dalam poin 9 dan 10. Pada poin

kesembilan, SAI20 menyerukan kepada pemerintah G20 untuk memastikan bahwa laju digitalisasi yang cepat tidak membuat ada pihak-pihak yang tertinggal dan bahwa transformasi digital dapat memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun pada poin 10, SAI20 menyerukan kepada pemerintah G20 untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk memanfaatkan transformasi digital dengan mengidentifikasi dan mengurangi risiko terhadap keamanan dan keselamatan data, keamanan, dan ketahanan siber, serta perlindungan dan privasi data.

Di dalam negeri, BPK telah aktif mengawal program transformasi digital. BPK melalui Auditorat Keuangan Negara (AKN) III akan melakukan pemeriksaan kinerja terkait transformasi digital.

Achsanul mengatakan, pemeriksaan dilakukan pada tahun ini terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo).

Achsanul menjelaskan, Kementerian Kominfo memiliki sejumlah program terkait transformasi digital. Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian Kominfo melakukan literasi digital. Program tersebut berbentuk sosialisasi mengenai digitalisasi kepada berbagai elemen masyarakat, seperti warga di perdesaan, pekerja, mahasiswa, hingga komunitas.

Kementerian Kominfo menargetkan ada sebanyak 50 juta orang yang mendapatkan literasi digital hingga 2024. Achsanul mengatakan, salah satu hal yang akan diuji BPK dalam pemeriksaan adalah mengenai kalangan masyarakat yang menjadi sasaran literasi digital oleh Kementerian Kominfo.

"Kita lakukan pengujian apakah program yang mereka (Kementerian Kominfo) jalankan itu sesuai atau tidak target sarannya. Misalnya, kalau lebih banyak menyasar untuk usia 70 tahun ke atas, itu bukan tidak ada manfaatnya, tapi tidak maksimal," kata Achsanul saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa* pada pertengahan September.

Achsanul mengatakan, literasi digital akan lebih bermanfaat jika lebih menyasar masyarakat usia produktif, seperti anak-anak muda di perdesaan. Menurut dia, literasi digital bagi pemuda di per-



■ Achsanul Qosasi sebagai Ketua Delegasi SAI Indonesia di SAI20.





■ Achsanul Qosasi

desaan bahkan bisa menekan angka urbanisasi.

“Dengan memahami dan mengerti cara memanfaatkan teknologi digital, anak-anak muda di perdesaan bisa menjalankan usaha atau berjualan dari desanya secara digital. Ini bisa menekan angka urbanisasi,” kata Achsanul.

Dia menegaskan, perkembangan teknologi informasi begitu cepat. Kecepatan itu harus diimbangi dengan keinginan dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan serta beradaptasi.

“Kita punya fasilitas dan infrastruktur yang sudah mumpuni. Tapi, tantangan besarnya adalah bagaimana kita memanfaatkannya,” ujar Achsanul.

Achsanul menambahkan, pemeriksaan terkait transformasi digital juga menelisik efektivitas pembangunan *base transceiver station* (BTS), khususnya BTS 4G. Ia memaparkan, Kementerian Kominfo menargetkan membangun 4.000 BTS dan yang sudah terpasang sekitar 2.000 BTS. “Kita juga hadir untuk melihat itu,” katanya.

Selain itu, AKN III bakal memeriksa program satelit dan pelayanan *ground segment*. Achsanul menjelaskan, *ground segment* merupakan pemberian fasilitas-fasilitas internet di berbagai tempat, seperti di kelurahan, perdesaan, dan sekolah.

“Anggaran untuk sejumlah program ini mencapai puluhan triliun rupiah. BPK akan hadir menguji apa yang sudah Kominfo lakukan dan nanti kita sampaikan kepada rakyat. Misalnya, apakah BTS-BTS yang dibangun berfungsi atau tidak. Karena percuma kalau kita bangun BTS, ada Palapa Ring, tapi tidak ada sinyal. Karena tujuannya adalah

sinyal. Sinyal harus sampai ke daerah 3T,” kata Achsanul.

## Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Transformasi digital diyakini memiliki manfaat bagi pengelolaan keuangan negara. Achsanul mengatakan, setiap aspek tata kelola perlu dimutakhirkan dengan transformasi digital, termasuk proses pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah oleh pemerintah.

Intensitas transaksi yang makin tinggi dan kompleksitas transaksi yang makin meningkat, menuntut adanya pemanfaatan teknologi informasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam pelayanan publik.

“Oleh karena itu, dengan adanya transformasi digital di sektor publik seperti *e-government* dan *digital government* di Indonesia, maka hal tersebut akan meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Hal ini dapat dilihat dengan penerapan *e-catalogue*, *e-procurement*, *e-budgeting*, dan *e-audit*,” ujar Achsanul.

## Penerapan di BPK

Achsanul mengatakan, BPK saat ini telah menerapkan transformasi digital yang memadai. BPK sudah membentuk Digital Enterprise Architecture BPK atau disingkat DNA BPK. DNA BPK menggambarkan hubungan antara proses bisnis, data, aplikasi, teknologi, sampai dengan implementasi arsitekturnya.

BPK juga telah melakukan pengembangan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). Saat ini, SiAP sudah terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sehingga, pemeriksa yang melakukan *re-assessment*, bisa terfasilitasi. “Integrasi ini penting untuk mendukung *risk audit* dalam melakukan pemetaan risiko entitas dan permasalahan di dalamnya, karena data yang dimiliki sudah terintegrasi.”

Capaian BPK yang juga penting yaitu pengembangan *big data analytics* atau BIDICS. BIDICS mempermudah pengambilan keputusan karena tersedia banyak data di dalamnya. Lewat BIDICS, pemeriksa mampu mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan tertentu.

Hal ini juga didukung dengan peningkatan infrastruktur teknologi informasi, baik *hardware* maupun *software*, dengan didukung pelatihan yang memadai terhadap sumber daya manusia yang ada di BPK. ●

## BERKOLABORASI MENYUKSESKAN SAI20

Kondisi pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan untuk persiapan SAI20.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menuntaskan rangkaian pertemuan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) hingga puncaknya di Nusa Dua, Bali pada 29-30 Agustus 2022. Segegap insan BPK dari berbagai satuan kerja bekerja bahu membahu guna sukseskan acara bertaraf internasional tersebut.

BPK membentuk tim *Project Management* (PM) untuk menangani pelaksanaan pertemuan SAI20 mulai dari tahap *technical meeting* hingga *summit* atau konferensi tingkat tinggi (KTT).

Kepala Subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSI Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Ami Rahmawati mengatakan, hampir seluruh satuan kerja di BPK terlibat dalam *Project Management* SAI20. Dia mencontohkan, anggota tim dari Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I bekerja sama untuk mengurus kebutuhan visa dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Selain itu, tim dari AKN III juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menangani kebutuhan imigrasi bagi para delegasi.

"Jadi memang hampir semua elemen di BPK terlibat dan berkolaborasi," ujar Ami kepada *Warta Pemeriksa*.

Berbagai tantangan hadir dalam pelaksanaan SAI20 yang dipimpin oleh BPK tersebut. Kini, hal itu menjadi kisah dan pengalaman berharga yang dapat disimpan untuk pengembangan BPK ke depan.

Ami menjelaskan, rangkaian SAI20 dimulai dengan pertemuan pertama berupa *Technical Meeting* (TM) pada Januari 2022. Hal itu dilanjutkan dengan gelaran *Senior Officials Meeting* (SOM) dan seminar pada Juni 2022 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seluruh kegiatan tersebut merupakan rangkaian untuk menuju ke arah puncak KTT, yaitu yang kemudian dihelat pada Agustus 2022.



■ Panitia SAI.

Salah satu kisah unik dari panitia yakni menghadapi tantangan dadakan yang harus segera diatasi. Ami mengisahkan, dalam masa persiapan penyelenggaraan SOM, pimpinan BPK meminta panitia untuk menetapkan hotel lokasi KTT SAI20.

"Wah, itu cukup pusing karena kami masih fokus menyiapkan SOM," ujarnya.

Tim PM pun menugaskan sejumlah anggotanya untuk melaksanakan survei ke sejumlah hotel di kawasan Nusa Dua, Bali. Kawasan itu memang sudah disiapkan untuk menjadi tuan rumah kegiatan internasional yang berkaitan dengan Presidensi G20 Indonesia 2022.

Tim akhirnya mengerucutkan pilihan ke Sofitel Nusa Dua, Bali. Ami mengatakan, anggota tim cukup berlibaku dengan tanggung jawab menyiapkan SOM sekaligus memantapkan kontrak dan kepastian *venue* KTT SAI20.

"Dengan kerja keras itu, di akhir pertemuan SOM di Labuan Bajo kami sudah mampu membuat video khusus yang menyatakan *summit* pada Agustus akan digelar di Sofitel," ujarnya.

Kondisi pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan untuk persiapan SAI20 terutama pada tahap awal atau ketika penyelenggaraan TM SAI20. Ketika itu,

penyebaran Covid-19 masih relatif tinggi. Tim PM pun berkoordinasi intens dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan arahan kebijakan di lapangan.

“Saat itu kita dianjurkan setiap hari harus ada *swab test*. Alhamdulillah semua berjalan lancar walaupun *deg-degan* juga setiap hari,” ujarnya.

Ami mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan pertemuan SAI20 juga didukung oleh berbagai pihak. Dia menyebutkan, dukungan Ditjen Imigrasi, otoritas bandara, dan Angkasa Pura (AP) I dan II sangat membantu terutama dalam pelaksanaan KTT.

Menurut Ami, pihak-pihak tersebut telah membantu BPK untuk memberikan penyambutan yang baik terhadap delegasi setibanya di lokasi KTT. Dia mengatakan, ketika itu, ruang VIP kedatangan internasional di Bandara Ngurah Rai, Bali sedang dalam proses renovasi untuk perhelatan KTT G20 pada November mendatang. Alhasil, pihak AP pun memberikan akses ruang muat di terminal kargo untuk disulap menjadi ruang kedatangan VIP.

“Itu adalah contoh dukungan yang bisa muncul berkat koordinasi dan kerja sama dengan AP, otoritas bandara, dan imigrasi,” ujarnya. Lebih lanjut, dukungan dari kementerian, lembaga lain seperti Kemenkominfo, Sekretariat Negara, TNI, Polri, PT Telkom, dan BSSN juga memegang peranan penting dalam menyukseskan perhelatan KTT dimaksud.

Selain itu, salah satu momen berkesan yang dirasakan Ami yakni ketika mendapatkan respons positif dari para delegasi saat diberikan baju endek khas Bali. Ami menjelaskan, pemberian baju endek be-

serta udeng kepada delegasi adalah hasil dukungan dari Pemprov Bali.

Sebelum kedatangan delegasi, tim PM sudah mengkomunikasikan pemberian baju tersebut untuk kemudian dikenakan pada acara pembukaan KTT SAI20. “Menariknya, para delegasi sangat *excited* ketika diberikan baju itu,” ujarnya.

BPK juga berupaya mendukung pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Bali yang tergabung dalam program Bali Bangkit. Program dari Pemprov Bali tersebut berupaya mendukung UMKM pulih dari efek pandemi.

UMKM Bali Bangkit pun berkesempatan menghadirkan produknya dalam *booth* di perhelatan SAI20. Selain itu, sejumlah souvenir yang diberikan kepada delegasi juga berasal dari UMKM Bali.

“Intinya, kami berusaha mendukung UMKM lokal,” ujarnya.

Ami mengatakan, banyak pelajaran berharga yang bisa

diambil dalam pelaksanaan SAI20 tersebut. Menurutnya, perbaikan demi perbaikan terus dilakukan dari setiap tahapan acara. Hal yang juga patut dibanggakan, menurut Ami, adalah kerja tim PM tanpa menggunakan jasa *event organizer*.

“Saya senang dan bangga bekerja dengan tim yang semakin *mature* dengan level *understanding* dan *acceptance* yang tinggi di tengah dinamika perubahan acara yang tinggi pula,” ujarnya.

Ke depannya, Ami berharap BPK dapat terus menggali kapasitasnya untuk dipercaya menggelar acara berskala internasional lainnya. “Selain untuk memperkuat eksistensi BPK di level global, hal ini juga agar masyarakat Indonesia dapat semakin memahami kiprah BPK,” ungkap Ami. ●



**Tentunya kita berharap  
BPK juga semakin dipercaya  
untuk berkiprah di level  
internasional.**





## INDIA BERKOMITMEN LANJUTKAN SAI20 YANG DIINISIASI BPK

SAI20 menyerukan kepada pemerintah negara-negara anggota G20 untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk melakukan berbagai hal.



■ Delegasi SAI India dalam KTT SAI20 di Nusa Dua, Bali.

India yang akan memegang Presidensi G20 2023 berkomitmen untuk meneruskan *engagement group* Supreme Audit Institutions 20 (SAI20). SAI20 merupakan *engagement group* baru G20 yang diinisiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka Presidensi G20 Indonesia 2022.

SAI20 pada akhir Agustus lalu telah melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Nusa Dua, Bali. KTT SAI20 sukses menghasilkan 12 poin komunike yang menjadi kesepakatan dan komitmen bersama para lembaga pemeriksa anggota negara-negara G20.

KTT SAI20 turut dihadiri SAI India atau Comptroller and Auditor General of India. BPK menyatakan, India telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan kepemimpinan SAI20 pada 2023.

Pemerintah India dalam keterangan tertulis menyatakan akan menjadi Presiden G20 selama satu tahun, sejak 1 Desember 2022 hingga 30 November 2023. KTT G20 2023 di tingkat kepala negara dijadwalkan berlangsung pada 9-10 September 2023 di New Delhi.

"Pemerintah India mengakui bahwa G20 saat ini terdiri atas *finance track*, *sherpa track*, dan 10 *engagement group* pada sektor swasta/masyarakat sipil/lembaga independen, yaitu Supreme Audit Institutions 20/SAI20, Business 20, Civil 20, Labour 20, Parliament 20, Science 20, Think 20, Urban 20, Women 20 dan Youth 20," demikian pernyataan Pemerintah India berdasarkan siaran pers BPK.

Pimpinan SAI berterima kasih pada BPK sebagai

pemrakarsa pembentukan SAI20 dan mendukung sepenuhnya keberlangsungan kiprah SAI20 dalam Presidensi G20 tahun 2023. Sebagai informasi, salah satu isi komunike KTT SAI20 adalah bahwa SAI20 menyadari pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menanggapi isu-isu global terkait.

Oleh karena itu, SAI20 menyerukan kepada pemerintah negara-negara anggota G20 untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk melakukan berbagai hal, di antaranya memastikan sistem kesehatan yang sigap dalam lingkungan yang selalu dinamis, dan sistem kesehatan yang adil, dengan tetap memprioritaskan ketersediaan, distribusi, serta pengalokasian sumber daya, dan fasilitas kesehatan.

KTT SAI20 diselenggarakan dengan tujuan mendiskusikan kontribusi nyata lembaga pemeriksa negara anggota G20, khususnya dalam menanggapi kebutuhan mendesak akan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas global. Utamanya dalam situasi dan pascapandemi untuk percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

SAI20 dibentuk sebagai platform pertemuan SAI negara anggota G20 dengan dua tujuan utama. Pertama, memberikan kontribusi kepada Pemimpin G20 dalam area transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem dan komunitas G20. ●



**KTT SAI20 sukses  
menghasilkan 12 poin  
komunike.**





**SAI20**

INDONESIA

2022

SUPREME AUDIT INSTITUTION



**G20**

INDONESIA

2022

**RECOVER TOGETHER  
RECOVER STRONGER**



## AKHMAD ANANG HERNADY, KEPALA DITAMA BINBANGKUM

# MEMPERKUAT ASPEK HUKUM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

**A**khmad Anang Hernady bertekad memperkuat peran dan kontribusi Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) BPK. Pria yang menjabat sebagai Kepala Ditama Binbangkum sejak Juli 2022 tersebut, memiliki sejumlah target yang ingin dicapai. Kepada *Warta Pemeriksa*, Akhmad menjelaskan secara detail program-programnya sebagai Kepala Ditama Binbangkum. Berikut petikan wawancara dengannya.

### **Apa saja program yang Bapak siapkan sebagai Kepala Ditama Binbangkum?**

Program yang saya jalankan tentunya tidak akan terpisahkan dari Renstra 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh BPK, yaitu penguatan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara. Pertama, dengan meningkatkan kualitas layanan legislasi, pengembangan, dan bantuan hukum. Ini dilakukan dengan pemenuhan bahan pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK, pemenuhan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan BPK, pemenuhan layanan bantuan hukum.

Selain itu, Ditama Binbangkum akan meningkatkan kapasitas konsultasi dan pertimbangan hukum pemeriksaan keuangan negara/daerah, serta layanan kepaniteraan kerugian negara/daerah. Hal ini mencakup pemenuhan layanan konsultasi hukum dalam pemeriksaan BPK, penyelesaian kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh bendahara dan pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD, pemenuhan bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari TP/TGR (Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi), serta perumusan bahan pertimbangan BPK atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Adapun hal lainnya, antara lain, mengimplementasikan nilai dasar BPK dalam melaksanakan tugas, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), melaksanakan penerapan manajemen pengetahuan, pemanfaatan teknologi dan informasi, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada pemanfaatan TI secara masif. Kemudian, mengembangkan kompetensi pegawai melalui pemenuhan jam diklat serta pemenuhan tingkat kinerja implementasi anggaran.

### **Bagaimana Bapak melihat perkembangan Ditama Binbangkum saat ini? Hal apa yang akan diperkuat oleh Ditama Binbangkum?**

Ditama Binbangkum mendukung penuh pencapaian Visi dan Misi BPK, terutama terhadap strategi 5 dalam arah kebijakan yang pertama, yaitu menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara. Dalam hal penguatan regulasi di bidang pemeriksaan keuangan negara, Ditama Binbangkum berupaya memberikan pertimbangan secara aktif terhadap rancangan dan peraturan perundang-undangan pemeriksaan keuangan negara, yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara.

Adapun dari sisi penguatan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara, Ditama Binbangkum menguatkan aspek-aspek hukum pemeriksaan keuangan negara. Tujuannya agar proses pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan termitigasi dari risiko tuntutan/gugatan hukum dari pihak lain.





**Ditama Binbangkum mendukung penuh pencapaian Visi dan Misi BPK, terutama terhadap strategi 5 dalam arah kebijakan yang pertama, yaitu menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.**

Kemudian mengenai penyelesaian ganti kerugian negara, kami berupaya meningkatkan peran aktif BPK dalam penyelesaian kasus ganti kerugian negara, baik yang disebabkan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara maupun pejabat lainnya.

Hal yang tidak kalah penting dari hal-hal tersebut sesuai dengan perkembangan organisasi saat ini, yaitu lembaga/instansi pemerintah dituntut untuk memiliki birokrasi yang efektif. Oleh karena itu, perlu dikaji dan diterapkan jabatan fungsional (JF) yang relevan untuk diterapkan di Binbangkum. Saat ini, telah diterapkan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan dan JF Pemeriksa. Serta saat ini sedang proses pengkajian penerapan JF Analis Hukum, yang juga dikaitkan dengan tugas dan fungsi Subbagian Hukum pada BPK Perwakilan. Harapan saya ini menjadi solusi bagi para komunitas hukum di BPK dalam mengembangkan karier dan jabatannya supaya lebih terbuka dan memberikan peluang kepada pegawai.

**Apa saja peran Ditama Binbangkum di BPK? Apa saja tantangan yang biasanya dihadapi Ditama Binbangkum?**

Peran Ditama Binbangkum adalah mem-



■ Akhmad Anang Hernady

berikan bantuan hukum. Saat ini masih ada gugatan terhadap LHP BPK. Kasus yang sedang ditangani per 5 Oktober 2022 sebanyak 10 gugatan perdata. Adapun salah satu tantangan yang perlu kita selesaikan adalah koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara yang belum optimal. Hal ini mengakibatkan kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan, masih terdapat banyak kekurangan dokumen dan masih banyak kasus tuntutan perbendaharaan yang belum dilaporkan.

Peran lainnya adalah pemberian konsultasi hukum. Kami melihat perlunya menyediakan media bagi pemeriksa untuk melakukan konsultasi hukum terkait permasalahan yang ditemukan di lapangan pada saat melakukan pemeriksaan yang dapat memberikan respons yang cepat dan tepat, sehingga dapat mendukung hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

**Bagaimana rencana bapak untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut?**

Untuk mencegah dan mengantisipasi adanya gugatan atas LHP, Ditama Binbangkum melakukan kegiatan mitigasi risiko hukum dalam pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, kami terus meningkatkan kualitas pemberian konsultasi hukum dan pendapat hukum.

Dalam hal terdapat gugatan kepada BPK, Ditama Binbangkum akan melakukan upaya untuk mempertahankan LHP BPK di persidangan, yaitu dengan melakukan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempersiapkan strategi penanganan perkara, serta mempersiapkan dokumen yang diperlukan.

Lalu, dalam rangka mengakselerasi penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, BPK merancang dan melaksanakan suatu inisiatif strategis Akselerasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, yang terdiri atas enam aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mendorong percepatan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Pertama, merancang Peraturan BPK tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pengelola BUMN/D dan/atau Lembaga/Badan yang mengelola keuangan negara/daerah. Kedua, meningkatkan kapasitas Kepaniteraan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. Ketiga, melaksanakan rekonsiliasi data Tuntutan Perbendaharaan, untuk mendapatkan data yang valid atas tuntutan perbendaharaan yang belum dilaporkan kepada MTP BPK. Keempat, melaksanakan *best practice* Kepaniteraan MTP 4.0, berupa digitalisasi dan penggunaan IT untuk mempercepat proses bisnis. Kelima, melakukan identifikasi, analisa hambatan atau permasalahan atas kerugian negara/daerah untuk bahan penyusunan pertimbangan BPK. Adapun yang keenam mengadakan *workshop*, *focus group discussion*, dan sosialisasi penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan *stakeholder*.

Kami juga menyediakan layanan konsultasi hukum *online* melalui Sistem Manajemen Hukum (SMH) dan alhamdulillah hasilnya telah memberikan kemudahan konsultasi hukum, baik secara jarak maupun telah mempersingkat durasi waktu layanan konsultasi hukum bagi AKN dan Kantor Perwakilan.

#### **Target apa yang ingin bapak kejar sebagai Kepala Ditama Binbangkum?**

Percepatan Penyelesaian konsep Peraturan BPK yang masuk dalam Program Legislasi BPK, yaitu:

1. Perubahan atas Peraturan BPK No. 4 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa pada BPK (proses penyusunan rancangan PBPBK).
2. Perubahan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik pada KAP yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara (proses penyusunan rancangan PBPBK).
3. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (proses penyusunan rancangan PBPBK).
4. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah (proses penyusunan rancangan PBPBK).
5. Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Nol Rupiah dan/atau Nol Persen yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan (proses penyusunan rancangan PBPBK).

Kemudian, meningkatkan pemberian layanan konsultasi hukum melalui SMH, meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara, dan memperoleh predikat Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM). Target lainnya adalah pengelolaan dan penerapan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan secara maksimal.

#### **Terkait kelembagaan BPK, bagaimana bapak melihat perkembangan BPK hingga saat ini?**

BPK merupakan Lembaga yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri berdasarkan UUD 1945. Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. BPK berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kiprah BPK akan selalu berusaha menjawab tantangan dan kebutuhan perkembangan za-

## PERJALANAN KARIER DI BPK



man dan teknologi dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara, antara lain, dengan cara memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan. Kemudian, mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara dan melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Melihat BPK saat ini, sebagai lembaga negara yang diatur di dalam konstitusi, memiliki posisi yang sangat strategis dan penting dalam mewujudkan tujuan negara. Peranan BPK terwujud dengan pelaksanaan tugasnya, yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, BPK juga memiliki kewenangan-kewenangan yang lain yang mendukung tugasnya diantaranya yaitu pemberian keterangan ahli dan pemberian pendapat serta tuntutan perbendaharaan.

Dari sisi kelembagaan/organisasi, sarana prasarana, dukungan sumber daya manusia dan anggaran telah mengalami banyak kemajuan. Selain itu perkembangan peraturan perundang-undangan. Sejak masuk menjadi pegawai, waktu itu BPK masih diatur dengan UU No. 5/1973 yang kemudian setelah amendemen UUD 1945 yang diiringi dengan penerbitan paket undang-undang di bidang keuangan negara, pada tahun 2006 diperbaharui dengan UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Di dalam perubahan UU tersebut, banyak perubahan signifikan yang membawa perkembangan BPK hingga saat ini. Di antaranya yaitu terbentuknya BPK Perwakilan yang ada di setiap Provinsi, hal ini yang semakin menunjukkan peran strategisnya.

Peran BPK di dunia internasional juga semakin nyata dengan keanggotaan dalam INTOSAI, ASOSAI maupun *working groups* yang melibatkan BPK. Bahkan BPK juga menginisiasi pembentukan ASEANSAL dan memprakarsai SAI20.

### Apa yang menjadi motivasi bapak dalam bekerja di BPK?

Motivasi dalam bekerja di BPK adalah berkarya dan mendedikasikan diri melalui melaksanakan tugas dan fungsi Ditama Binbangkum utamanya dalam memberikan pelayanan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pelayanan informasi hukum kepada Anggota BPK dan/atau pegawai pada Pelaksana BPK, legislasi, penelitian dan pengembangan hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah.

Selain itu, selalu memperhatikan moto pelayanan Ditama Binbangkum, yaitu "Ditama Binbangkum Pasti Bisa Melayani". Kata PASTI mengandung nilai-nilai yang terkait karakter pegawai, yaitu Profesional, Amanah, Sinergi, Tanggung jawab, Integritas. Selanjutnya untuk kata BISA terkait dengan nilai-nilai terkait dengan keluaran yaitu, Bermanfaat, Inovatif, Solutif, dan Andal.

### Apakah ada pesan yang ingin bapak sampaikan kepada pegawai BPK, khususnya Binbangkum?

Bekerja memberikan yang terbaik untuk pencapaian diri dan dedikasi sepenuhnya untuk BPK sesuai sasaran kerja dan kinerja masing-masing dengan selalu memperhatikan nilai-nilai BPK, kode etik, dan taat dengan ketentuan peraturan perundangan yang setiap hari diimplementasikan dalam budaya kerja. Binbangkum PASTI BISA Melayani. ●

- a CPNS, Maret 1993.
- b PNS, Juli 1994.
- c **Pemeriksa Muda**, Mei 1995.
- d **Auditor Ahli Muda** pada AKN IV, Maret 1999.
- e **Kepala Subbagian Hukum dan Perundang-undangan**, Desember 1999.
- f **Memperoleh Satyalancana Wira Karya** pada Juni 2002.
- g **Kepala Bagian Legislasi dan Informasi Hukum**, Mei 2005.
- h **Kepala Subdirektorat Legislasi dan Informasi Hukum**, Juli 2007.
- i **Kepala Subauditorat Jawa Timur III**, Maret 2008.
- j **Kepala Sekretariat Perwakilan Jawa Timur**, Maret 2010.
- k **Kepala Direktorat LABH**, November 2011.
- l **Memperoleh Satyalancana Karya Satya 20 Tahun** pada Agustus 2013.
- m **Kepala Direktorat LPBH**, November 2014.
- n **Kepala Direktorat KHK**, Oktober 2018.
- o **Inspektorat Penegakan Integritas**, Oktober 2020.
- p **Kepala Ditama Binbangkum**, Juli 2022.



Majalah bulanan Warta Pemeriksa  
mendapat penghargaan dalam

## The 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022

Berlangsung di Jawa Tengah,  
pemberian penghargaan  
dilaksanakan pada 25 Maret 2022.



## BPK BAGIKAN INFORMASI SOAL PEMERIKSAAN IAEA KE CAG INDIA

Melalui kegiatan ini, BPK membagikan pengalamannya kepada CAG India terkait kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan selama menjadi pemeriksa eksternal IAEA.



**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) membagikan informasi mengenai pemeriksaan terhadap Badan Atom Dunia atau International Atomic Energy Agency (IAEA) kepada Comptroller and Auditor General of India (CAG). Hal ini dianggap langkah penting bagi kelancaran pemeriksaan mendatang, sekaligus dalam upaya monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan.

Penyerahan itu dilakukan Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono dengan menandatangani *handover statements* bersama Deputy CAG India, Parveen Mehta di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral BPK dan CAG India serta IAEA dalam pertemuan Programme and Budget Committee (PBC) IAEA pada 9 Juni 2022.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK menyebutkan, serah terima ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap International Organizations of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Guidances GUID 5090-Audit of International Institutions yang dikeluarkan oleh INTOSAI sebagai bagian dari INTOSAI Framework of Professional Pronouncements. Melalui kegiatan ini, BPK membagikan pengalamannya kepada CAG India terkait kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan selama menjadi pemeriksa eksternal IAEA.

“Saya percaya, memiliki akses terhadap dokumen-dokumen ini akan membawa dampak penting pada pemeriksaan mendatang dan membantu dalam memonitor tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan,” kata Wakil Ketua BPK.

Menanggapi hal tersebut, Deputy CAG India menyambut baik dan mengapresiasi BPK yang telah bersedia untuk berbagi pengalaman pemeriksaannya di IAEA. “Kami sangat menghargai penawaran BPK untuk berbagi pengalaman dan pandangannya terkait dengan pemeriksaan terhadap IAEA,” ungkapnya.

BPK melakukan pemeriksaan keuangan terhadap IAEA pada 2016-2021. Berdasarkan pemeriksaan itu, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan rata-rata pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi mencapai 85%.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional R Yudi Ramdan Budiman, Kepala Pusat Kemitraan Global BPK Ikhtaria Syaziah, serta tim pemeriksa keuangan dan kinerja IAEA.

Sementara itu, delegasi CAG India dihadiri oleh Principal Director of International Relations Division Amitabh Prasad, Director of International Relations Division Eti Shukla, Director of Personnel Vishal B Desai, dan Senior Administrative Officer of the International Relations Division Rajeev Gurkha. ●

## BPK DAN BAI KOREA LAKUKAN PEMBARUAN KERJA SAMA

Hal ini menegaskan komitmen untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan sektor publik di kedua institusi.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pembaruan kerja sama dengan Board of Audit and Inspection (BAI) Republik Korea. Pembaruan terutama dalam bidang pemeriksaan sektor publik yang telah berakhir sejak September 2018. Hal ini menegaskan komitmen untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan sektor publik di kedua institusi.

Pertemuan dihadiri oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan negara/Anggota VII BPK Hendra Susanto dengan Commissioner BAI Republik Korea, Cho Eun-Seok di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9). Pertemuan diselenggarakan di sela-sela SAI20 Summit yang merupakan puncak pertemuan SAI negara-negara G20.

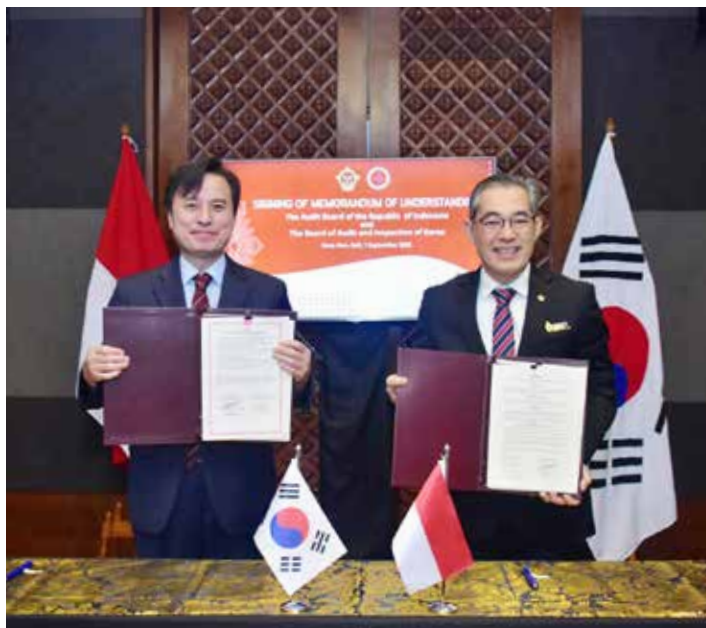
Dalam pertemuan ini, Hendra menyampaikan apresiasi atas dukungan BAI melalui program pelatihan tentang peningkatan kapasitas audit bagi pegawai BPK. Program yang berjalan sejak 2016 itu bekerja sama dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA).

"Kami sangat mengapresiasi program pelatihan *online* mengenai peningkatan kapasitas audit yang diselenggarakan oleh Audit and Inspection Training Institute, BAI Korea," ungkap dia.

Hendra juga mengapresiasi dukungan dan kontribusi BAI dalam menyusun komunikasi SAI20. Karena dukungan itu merupakan bentuk partisipasi dalam inisiatif global untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Termasuk juga mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Pada kesempatan itu, Commissioner BAI Korea turut menyampaikan apresiasi atas kesuksesan BPK dalam menyelenggarakan SAI20 Summit. Apalagi, kegiatan itu menghasilkan *output* yang sangat penting guna mendukung pencapaian SDGs 2030.

Anggota VII BPK dan Commissioner BAI juga membahas mengenai rencana implementasi



■ Penandatanganan nota kesepahaman oleh Commissioner the BAI of the Republic of Korea Cho Eun-Seok dan Anggota VII BPK Hendra Susanto.

kerja sama bilateral selanjutnya. Misalnya saja, melanjutkan program pengembangan kapasitas audit keuangan negara.

Kemudian, *sharing knowledge* dalam bidang audit digital dan penyelenggaraan kunjungan tahunan *senior management* di antara kedua institusi untuk memperkuat longterm perspektif. Lalu, program *secondment* dalam jangka waktu satu tahun bagi pegawai di kedua institusi.

Dalam pertemuan tersebut, Hendra didampingi oleh sekretaris jenderal Bahtiar Arif, auditor utama Keuangan Negara VII Novy GA Pelenkahu, kepala Ditama Binbangkum Akhmad Anang Hernady, staf ahli bidang BUMN/BUMN dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Novian Herodwijanto, dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional R Yudi Ramdan Budiman.

Sementara Commissioner BAI didampingi oleh Director General, Bureau 1 of Citizens Request Audit Yoo Byoung-ho dan dua auditor, yaitu Lim Kilae dan Min Sojung. ●



# Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai PPID BPK Mobile

**Segera Unduh di Playstore  
BPKawan!!**





■ Ajiep Padindang

**AJIEP PADINDANG,  
KETUA BADAN  
AKUNTABILITAS  
PUBLIK (BAP) DPD RI**

## **SELALU LAKUKAN PEMERIKSAAN KINERJA**

**K**etua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Ajiep Padindang menilai, BPK sangat berkontribusi dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Ia pun berharap BPK terus memperkuat dan

memperbanyak pemeriksaan kinerja terhadap pemerintah daerah. Berikut petikan wawancara *Warta Pemeriksa* dengan Ketua BAP DPD RI terkait perkembangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan upaya-upaya BPK dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

### **Bagaimana Bapak melihat perkembangan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hingga saat ini?**

Membaca hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika diukur secara kuantitatif, jumlah pemda yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga tahun 2021 sudah lebih 90 persen. Tetapi jika dianalisis variabel yang menyebabkan WTP atas LKPD, menurut saya kualitasnya masih harus ditingkatkan.

Saya berharap BPK terus memperkuat prosedur pemeriksaan, misalkan untuk tidak menggunakan sistem *sampling*. Apabila pada satu kegiatan ditemukan ada hal yang tidak benar, maka baiknya seluruh kegiatan tersebut diperiksa tuntas. Sebab, biasanya yang kena *sampling* yang ditindaklanjuti secara parsial, sementara yang tidak di-*sampling* dianggap tidak masalah. Hal ini terutama jika berkaitan biaya operasional, seperti perjalanan dinas.

Di satu sisi, terjadinya peningkatan kualitas LKPD tersebut karena pemda telah melakukan perbaikan, antara lain, melakukan inventarisasi aset tetap dan mencatat hasil inventarisasi tersebut, serta melakukan pengembalian dana atas ketekoran kas dan kelebihan pembayaran belanja modal dan belanja barang dan jasa. Namun,

saya juga mendorong BPK RI agar memberikan rekomendasi kepada pembuat petunjuk teknis di kementerian/lembaga agar juknis tidak berubah-ubah. Terutama pada penepatan standar harga satuan dan jenis barang sesuai E Katalog.

Pada intinya, BPK sangat berkontribusi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan pemda. Namun, pemda masih terkesan belum maksimal dalam mengelola Sistem Informasi Keuangannya pada publik.

### **Apa saja upaya yang BAP DPD RI untuk mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah?**

Sesuai tata tertib DPD RI, upaya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK oleh pemda, dilaksanakan oleh Komite IV dan BAP DPD RI khusus yang terindikasi ada kerugian negara/daerah. Setiap selesai penyerahan laporan keuangan dari BPK RI (LHPS dan IHPS) kepada DPD, BAP DPD RI mengadakan analisis oleh Tenaga Ahli (TA) dan hasil analisis tersebut menjadi bahan bagi anggota BAP untuk menjadikan bahan pengawasan di daerah pemilihan masing-masing. BAP DPD RI juga mengadakan pendalaman dengan berkonsultasi kepada Pimpinan BPK RI atau secara khusus

pada auditor utama BPK RI, untuk menjadi bahan dalam melaksanakan kunjungan kerja BAP.

BAP DPD RI secara kelembagaan melakukan kunjungan kerja ke daerah dengan melaksanakan pertemuan dengan Perwakilan BPK RI, unsur APH (Kejaksanaan dan Kepolisian) di daerah. Namun karena keterbatasan anggaran BAP DPD RI, maka biasanya dalam satu kegiatan kunjungan kerja, dipilih dua atau tiga provinsi berdasarkan hasil pendalaman sebelumnya. Pada saat itulah BAP DPD RI mendorong Perwakilan BPK RI, APH untuk mengencarkan upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

### **Sejauh mana koordinasi BAP DPD RI dengan BPK RI terkait peningkatan kualitas LKPD?**

BAP DPD RI secara kelembagaan secara periodik melakukan rapat kerja (raker) dan rapat dengan pendapat (RDP) dengan BPK RI sesuai kondisi yang terjadi. BAP DPD RI juga selalu melakukan kunker ke daerah untuk bertemu Perwakilan BPK RI di daerah-daerah. Demikian pula secara perorangan, Anggota BAP dalam masa reses juga kerap melakukan kunjungan kerja untuk bertemu Perwakilan BPK RI di daerah.



**Pada intinya, BPK sangat berkontribusi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan pemda. Namun, pemda masih terkesan belum maksimal dalam mengelola Sistem Informasi Keuangannya pada publik.**

### **Menurut Bapak, hal apa saja yang perlu ditingkatkan oleh pemda dan BPK?**

LKPD sebaiknya diperiksa secara menyeluruh, bukan dengan sistem sampling atau karena keterbatasan tenaga dan biaya BPK RI harus dengan sampling. Maka perlu juga dilaksanakan pemeriksaan fisik program dan kegiatan (proyek fisik), walau sistem sampling, terutama untuk DAK fisik.

Sebaiknya selalu dilaksanakan pemeriksaan kinerja untuk mengukur kemanfaatan anggaran yang dialokasikan dalam APBD, sesuai LKPD-nya. Terutama untuk belanja bantuan keuangan, khususnya bansos dan dana bencana alam. BPK perlu merekomendasikan pada Pemda, agar pejabat bi-

dang keuangan daerah, tidak selalu berganti-ganti dan yang diangkat yang memiliki sertifikasi bidang pengelolaan anggaran/keuangan.

### **BPK saat ini berupaya memperbanyak pemeriksaan kinerja. Pada semester I 2022, BPK melakukan pemeriksaan kinerja terkait program penanggulangan kemiskinan di daerah. Apa pendapat dan harapan bapak terkait pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK?**

Menurut saya tema pemeriksaan kinerja terkait penanggulangan kemiskinan sangat bagus, apalagi jika dikaitkan dengan penanganan Covid-19. Sebab arah kebijakan anggaran selama tiga tahun terakhir, diarahkan pada masalah Covid-19. Namun untuk pemeriksaan perlu juga dikaitkan langsung dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah pusat. Misalnya, untuk dana transfer ke daerah yang dilakukan *refocusing* pada belanja Covid-19. Bahkan ada DAU yang langsung dipotong Kementerian Keuangan untuk perhitungan insentif pelaksanaan vaksinasi oleh Kepolisian dan TNI.

Pemeriksaan terutama pada data yang tidak akurat, sehingga sasaran program penanggulangan kemiskinan dengan berbagai jenis bansosnya.

Menurut saya, tema pemeriksaan kinerja yang juga perlu dilaksanakan BPK di masa mendatang adalah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kinerja anggaran (APBD), sesuai Renstra dan Renja yang tertuang dalam APBD dengan target-target capaian secara kuantitatif pagu anggaran dan secara kualitatif capaian programnya. Secara khusus, disarankan pemeriksaan berfokus pada kesesuaian kewenangan, urusan dan tanggung jawab masing-masing pemda dan OPD-nya. Bahkan perlu pemeriksaan mengenai sinergitas APBN dengan APBD dan APBD Provinsi dengan APBD Kabupaten/Kota.

Terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), pemda perlu didorong untuk memfungsikan secara maksimal Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), baik provinsi maupun kabupaten/kota. DPRD perlu didorong untuk melaksanakan pengawasan atas TLRHP dan peran TPTGR di daerah masing-masing.

Pada intinya, menurut saya kunci LKPD berkualitas adalah pada Gubernur dan Bupati/Walikota, terutama untuk TLRHP. Kami DPD RI, khususnya BAP, secara rutin mendorong pemda untuk meningkatkan LKPD, khususnya penanganan TLRHP, bahkan terkadang konsultasi dengan pimpinan APH di provinsi (Kajati atau Kapolda). ●



## WAHYU SANJAYA, KETUA BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN) PERTAJAM REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

**S**inergi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dinilai sudah cukup baik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Meski begitu, Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya menilai, adanya temuan-temuan berulang

menjadi salah satu hal yang perlu diatasi baik oleh pemerintah maupun BPK.

Selain itu, kepada *Warta Pemeriksa*, Wahyu juga memberikan penekanan terhadap pentingnya perbaikan basis data yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Berikut petikan wawancaranya.

### **Bagaimana Anda melihat kualitas pemeriksaan BPK dan penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah saat ini?**

Saya kira kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga serta pemda yang disampaikan ke DPR itu dari tahun ke tahun sudah cukup baik. Kita bisa melihat bahwa BPK juga tetap independen dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Saya kira itu bagus dan selalu ada peningkatan kualitas maupun usaha yang cukup keras dari BPK agar kita semua bisa memperbaiki pengelolaan keuangan di republik ini.

### **Bagaimana hubungan dan koordinasi yang terjalin antara BPK dan BAKN dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan?**

Sampai saat ini, saya kira cukup baik. Berkali-kali, kami meminta BPK untuk menjadi narasumber dalam sejumlah forum seperti *focus group discussion*. Itu BPK selalu menyiapkan tenaga-tenaga yang andal dan ahli.

Permintaan data dari kami juga selalu diakomodasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), BAKN melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Di samping itu, kami juga bisa mendorong adanya pemeriksaan tematis yang perlu dilakukan. Sejauh ini, BPK selalu menjamin adanya tenaga-tenaga yang dibutuhkan oleh BAKN.

Jadi memang sinerginya sudah sangat kuat selama ini. Bahkan, pada saat kami kunjungan ke daerah, tim dari BPK perwakilan tingkat provinsi di

daerah mana pun selalu memberikan *support* yang baik untuk kami.

### **Apakah sinergi tersebut menjadi salah satu bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara?**

Ya, tentu saja. Misalnya, tugas kami sesuai amanat undang-undang yakni melakukan telaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang kemudian nanti akan diserahkan kepada komisi. Jadi kita ketahui bersama, di DPR itu ada komisi I sampai komisi XI. Sedangkan BPK melakukan pemeriksaan terhadap seluruh entitas.

Kami memisahkan hasil pemeriksaan BPK dan melakukan simplifikasi agar lebih sederhana untuk dibaca bagi kawan-kawan di komisi. Dengan demikian, mereka tetap bisa melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja mereka.

Jadi, kami memberikan itu secara periodik setiap tahunnya. Buku itu merupakan hasil pemeriksaan BPK yang kemudian kami telaah dan kemudian kami lihat di mana poin-poin yang butuh diperkuat oleh teman-teman di DPR. Hal ini dalam rangka pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

### **Berdasarkan catatan BPK, persentase opini WTP dari LKKL, LKBUN, dan LKPD sudah semakin baik dan telah memenuhi target RPJMN. Menurut Anda, apa hal yang perlu dilakukan selanjutnya?**

Kalau kita lihat memang ada yang menjadi *concern* kami. Pertama, kami mengapresiasi tingkat opini WTP yang diperoleh pemerintah sudah semakin baik. Akan tetapi, masih sering terdapat temuan yang berulang.



**Tugas kita di samping memeriksa adanya kerugian negara, kita perlu memastikan bahwa temuan itu tidak terjadi terus-menerus. Sehingga, perlu ada perbaikan sistem atau *extra effort* yang lain agar temuan-temuan itu tidak berulang.**

Sebenarnya, kami juga mempertanyakan kenapa seseorang bisa melakukan kesalahan yang sama. Sehingga, perlu ada penekanan terhadap temuan-temuan yang berulang ini.

Tugas kita di samping memeriksa adanya kerugian negara, kita perlu memastikan bahwa temuan itu tidak terjadi terus-menerus. Sehingga, perlu ada perbaikan sistem atau *extra effort* yang lain agar temuan-temuan itu tidak berulang.

**Selain melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja. Kalau menurut Anda, apa tema pemeriksaan kinerja yang perlu dikembangkan ke depan?**

Kalau menurut kami, sudah tentu yang berkaitan dengan program strategis nasional atau prioritas nasional. Itu menjadi *concern* kita.

Kemudian, satu hal lagi yang saat ini kita semua sedang memperhatikan yaitu terkait inflasi. Bagaimana pengendalian inflasi itu bisa terus berjalan dengan baik.

Menurut saya, perlu menjadi skala prioritas juga agar kita bisa mendorong pemerintah untuk membuat *single basis data* terhadap keluarga prasejahtera. Menurut saya, tanpa basis data yang baik kita tidak akan bisa membuat program yang baik dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Kita sudah melihat beberapa kali bahwa ada dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat. Sebenarnya, kalau kita perhatikan dengan lebih baik lagi, maka program subsidi itu perlu lebih tepat sasaran.

Tentunya, kita tidak bisa membuat program subsidi menjadi tepat sasaran apabila kita tidak mempunyai basis data kemiskinan yang baik. Kita tidak bisa mengabaikan itu dan kita berharap BPK bisa mendorong peran pemerintah. Kita ingin dalam pemeriksaan BPK agar ada dorongan perbaikan basis data keluarga prasejahtera.

**Saat ini, tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK sudah mencapai 77,3 persen. Menurut Anda, apa hal yang perlu disampaikan ke entitas terhadap tingkat TLRHP saat ini?**

BAKN mengapresiasi pencapaian itu. Walaupun tentunya kita juga lebih senang apabila tidak ada temuan yang terjadi.

Akan tetapi, terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, BAKN berharap agar BPK terus menjalankan amanat undang-undang. Tentu kita juga ingin agar pemeriksaan BPK bisa lebih bermanfaat terhadap entitas. Tidak ada gunanya pemeriksaan apabila tidak terjadi pengembalian kerugian negara, contohnya seperti itu.

**Pada semester I 2022, BPK melaksanakan pemeriksaan terkait transportasi perkotaan berkelanjutan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Bagaimana pendapat Anda terkait tema pemeriksaan yang diambil BPK tersebut?**

Kalau terkait transportasi perkotaan, saya setuju dan sepakat. Akan tetapi, memang dari sisi politisnya, persoalan ini menjadi domain pemerintah.

Saya melihat ada persoalan bahwa kesadaran untuk membangun transportasi publik yang baik. Namun, memang hal itu butuh waktu.

Saya kira ada hal-hal yang bisa dikerjakan secara lebih cepat dan tepat sasaran sambil menunggu pembangunan transportasi publik yang butuh waktu tersebut. Sebenarnya keruwetan transportasi publik itu berkaitan dengan desain tata ruang yang tidak baik.

Kalau kita perhatikan dengan lebih cermat, ada hal-hal kecil yang bisa diperbaiki agar transportasi publik menjadi lebih lancar. Contohnya, di kawasan Semanggi itu ada halte bus yang justru menjadi sumber kemacetan. Saya kira semua kalangan mulai dari BPK, DPR, polisi lewat di kawasan itu. Tentu perlu dipikirkan bagaimana cara-cara mengatasi simpul kemacetan tersebut.

Memang BPK tidak memeriksa proses perencanaan ini. Tapi, saya kira ini bisa menjadi bahan rekomendasi BPK untuk disampaikan ke entitas agar ada perbaikan.

Jadi, saya kira BPK tidak hanya melihat masalah dari perspektif yang luas tapi juga detail-detail seperti masalah tersebut.

Untuk persoalan penanganan keluarga prasejahtera, seperti sudah saya sampaikan tadi, bagaimana pemeriksaan BPK bisa mendorong agar Indonesia punya basis data.

Kalau kita bicara basis data saat ini, maka kita akan bertanya basis data milik siapa? Milik Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, atau Kementerian Keuangan?

Oleh karena itu, BPK dalam rekomendasi hasil pemeriksaannya perlu mendorong ada basis data tunggal yang bisa digunakan seluruh kementerian dan lembaga

terkait data keluarga prasejahtera. Saya rasa itu lebih baik.

Saya selalu berpikiran positif bahwa kita semua sebenarnya ingin kerja dengan baik. Masalahnya, kita bekerja tidak didukung dengan data yang baik.

**Apa harapan Anda terhadap kerja dan sinergi ke depannya bersama BPK?**

Harapannya ke depan BPK dapat memastikan bahwa semua hasil rekomendasi bisa memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat.

Koordinasi selama ini sudah cukup baik. Apa yang dilakukan BPK juga sudah bagus. Sudah banyak terjadi perubahan. Kementerian dan lembaga saat ini juga sudah lebih patuh terkait akuntabilitasnya.

Hanya saja, memang *concern* saya dengan pemerintah itu bagaimana mereka mulai memperbaiki basis data. Saya kira perbaikan data itu bisa berdampak ke banyak hal dan menghemat keuangan negara. ●



**Saya kira perbaikan data itu bisa berdampak ke banyak hal dan menghemat keuangan negara.**



# Syarat Isolasi Mandiri (Isoman)

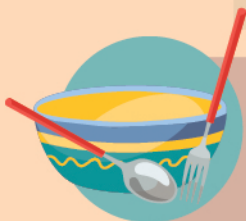
Jika pasien Covid-19:

Tidak bergejala atau bergejala ringan.

-----  
Dinyatakan oleh tenaga medis dapat melakukan isoman.

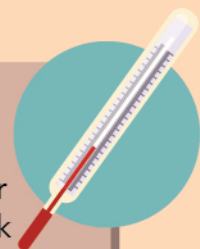


## Persiapan isoman



Siapkan kamar, alat makan, dan kamar mandi terpisah dengan anggota keluarga yang negatif Covid-19.

Siapkan termometer dan oksimeter (*pulse oxymetry*) untuk memantau suhu, saturasi oksigen serta frekuensi nadi.



Siapkan obat-obatan dan vitamin untuk menunjang daya tahan tubuh.





■ Kegiatan *Daycare*, belajar mewarnai.

## MENGHIDUPKAN KEMBALI DAYCARE BPK BENGKULU PASCA PANDEMI

Terbentuknya fasilitas *daycare* bermula dari curahan hati ibu-ibu pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang mengeluhkan ketiadaan pengasuh bagi anak, sementara mereka harus bekerja.

**B**erawal dari kerisauan sulitnya mencari pengasuh bagi anak, insan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khususnya kaum ibu, berinisiasi untuk membuat fasilitas *daycare* di kantor. Keberadaan fasilitas itu sangat membantu para kaum ibu di BPK. Mereka bisa lebih tenang bekerja karena sang buah hati aman dan diasuh dengan baik di fasilitas *daycare*.

*Daycare* BPK Bengkulu yang didirikan pada 2018, sempat berhenti beroperasi akibat pandemi Covid-19. Kini, setelah melandainya kasus Covid-19, fasilitas itu pun kembali diaktifkan.

Wakil ketua Dharma Wanita Perwakilan BPK Bengkulu Ny. Ade Ranni Agriadi menceritakan, terbentuknya fasilitas *daycare* bermula dari curahan hati sejumlah kaum ibu yang mengeluhkan ketiadaan pengasuh bagi anak, sementara mereka harus bekerja.

"Latar belakangnya karena waktu itu banyaknya keluhan dari ibu-ibu di lingkungan kantor Bengkulu ini yang kesulitan, saat mereka bekerja, anaknya tidak ada yang mengasuh. Ada juga yang sebagian sudah punya pengasuh, tapi kesulitan dalam memantau anaknya di rumah," kata Ny. Ade Ranni Agriadi saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa* pada akhir September.

Ny. Ade Ranni Agriadi mengatakan, dua pegawai BPK, yaitu Dwi Rahayuningsih dan Nendra Susanti, menyulap sebuah ruangan untuk diberdayakan dan digunakan sebagai tempat penitipan anak atau *daycare*. Kebetulan, ucap Ny. Ade Ranni Agriadi, di Kantor BPK PWK Bengkulu ada ruangan olahraga yang awalnya sempat digunakan, kemudian terbengkalai dan dijadikan gudang.

Setelah keduanya meminta izin untuk penggunaan dan disetujui, maka akhirnya para karyawan BPK menyulap ruangan tersebut menjadi *daycare* bagi para anak karyawan BPK. "Dan ruangan *fitness* itu dipindah ke ruang klinik, karena kliniknya kebetulan juga mau dipindahkan," ujar dia.

Dalam ruangan seluas 10x10 meter persegi, para ibu karyawan BPK menyediakan tiga kasur, meja, kulkas, dan lemari untuk menyimpan mainan.

Sementara itu, menurut Dwi Rahayuningsih, *Daycare* BPK Bengkulu pun berjalan dan menerima anak-anak karyawan BPK. Seiring berjalannya waktu, *Daycare* Bengkulu berbenah, mulai dari penambahan peralatan hingga membuat media sosial.

"Nah seiring berjalannya waktu, kita membuat sosmed *daycare*, terus kebetulan jadi banyak yang tahu dari pihak eksternal, kemudian banyak yang ingin masuk ke *daycare* kita," ucap dia.

Ia menyatakan dengan kondisi tersebut, pengelola *Daycare* Bengkulu pun meminta izin ke-

pada Kepala Sekretariat Perwakilan untuk bisa menerima anak dari pihak luar. Selain masih tersedia ruang, *Daycare* Bengkulu juga membutuhkan dana untuk membayar pengasuh.

Lewat uang bulanan internal dan eksternal, *Daycare* Bengkulu pun bisa menambah alat permainan dan pengasuh. *Daycare* BPK Bengkulu pun berupaya membuat struktur pengurusan mulai dari pengasuh hingga PIC.

"Pada Tahun 2019 kita berusaha untuk memperbaiki manajemen pengelolaan *daycare*, dan telah membuat beberapa program dan rencana untuk mengembangkan *daycare*, seperti misalnya membeli peralatan dan media pembelajaran, tapi ternyata ada pandemi, sehingga *bu- yar* semua rencana itu," ungkapny.

Ketika pandemi menghantam, *Daycare* Bengkulu benar-benar tutup. Selain untuk menjaga protokol kesehatan, ini juga karena seluruh karyawan bekerja dari rumah atau WFH. Pengelola *Daycare* Bengkulu selama tiga bulan sempat tetap membiayai para pengasuh. Akan tetapi karena ketiadaan pendanaan dari luar, pengasuh terpaksa diberhentikan.

"Pada saat itu Dharma Wanita di Bengkulu belum terbentuk, sehingga *Daycare* masih berjalan secara mandiri dan belum mendapat subsidi dari Dharma Wanita," tutur Wakil ketua Darma Wanita Perwakilan BPK Bengkulu Ny. Ade Ranni Agriadi menambahkan.







### Aktif kembali

Ny. Ade Ranni Agriadi menyatakan, pada 2019, Dharma Wanita belum aktif. Hingga kemudian ia diminta untuk mengaktifkan meski kemudian beberapa kali berganti kepala perwakilan.

Sampai akhirnya, Dharma Wanita diaktifkan pada Januari 2021. "Pada saat itu Kepala Perwakilan kita adalah seorang ibu, dan menunjuk saya sebagai ketua dharma wanita persatuan Bengkulu, di masa kepemimpinan beliau," ucap dia.

Sementara untuk Daycare baru aktif kembali pada awal 2022. Ia menyebut tempat penitipan aktif semenjak mulai ada pemberlakuan kembali bekerja dari kantor atau WFO.

Ayu, dalam hal ini yang kembali sebagai koordinator *daycare*, mengaku memang ketika kembali aktif butuh waktu. Karena saat itu tidak ada lagi pengasuh yang bisa menjaga anak-anak.

Setelah berhasil mengumpulkan pengasuh untuk menjaga anak-anak, *daycare* pun aktif kembali. Saat ini ia menyebut total ada delapan anak yang diasuh di

*daycare* dengan jumlah pengasuh tiga orang.

Sementara untuk anak yang diasuh adalah yang berusia dua hingga enam tahun.

Padahal di 2019, anak yang diasuh bisa mencapai 11 anak, baik berasal dari karyawan BPK maupun dari luar. Sedangkan saat ini, Daycare BPK tidak menerima anak dari luar. Ia berujar selain karena jumlah pengasuh yang tidak memungkinkan, Daycare Bengkulu juga berupaya menjaga protokol kesehatan.

Ayu juga berupaya kembali membuat program-program ajar bagi anak.

"Makanya kami tidak lagi aktifkan media sosial. Karena kalau media sosial aktif banyak sekali ibu-ibu yang menghubungi. Memang untuk saat ini di Bengkulu sendiri jumlah *daycare* belum terlalu banyak," tutur dia.

"Untuk saat ini Daycare BPK telah berada di bawah naungan DWP Bidang Pendidikan, dengan harapan kedepannya bisa lebih memajukan Daycare dan Programnya lebih terencana," ujar Ketua Bidang Pendidikan, Ny. Dina Zuniar Viki.

Salah satu program yang akan dilaksanakan yaitu program guru tamu. "Jadi satu bulan sekali kita mengundang pegawai atau istri pegawai yang berkenan yang bisa memberikan permainan-permainan edukatif atau ketrampilan yang membantu anak-anak. Dan ini tidak hanya untuk anak-anak *daycare*, tapi juga untuk anak-anak pegawai boleh ikut. Yang di bawah usia enam tahun boleh ikut. Jadi *daycare* bisa lebih hidup," papar Ny. Dina Zuniar Viki. ●



■ Wakil Ketua DW  
Ny. Ade Ranni  
Agriadi



■ Kondisi ruangan *daycare* BPK Bengkulu.



BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

## SEMAKIN MUDAH MENGAKSES INFORMASI MELALUI...



[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



BPK RI Official



@bpkri



@bpkriofficial



08111907010



bpk.ri



**PPID**

EPPID Mobile





## KISAH BPK SULBAR BANGKIT DARI MUSIBAH GEMPA

BPK Sulbar melakukan kegiatan *trauma healing* bekerja sama dengan Employee Care Center (ECC) Biro Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dilakukan untuk mengurangi trauma pada pegawai pascagempa.



■ Kerusakan gedung BPK Perwakilan Sulbar akibat gempa tahun 2021.



**G**empa bumi berkekuatan 6,2 SR yang melanda Kabupaten Mamuju pada awal 2021 turut berdampak pada kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Musibah tersebut merusak bangunan kantor dan aktivitas perkantoran BPK Sulbar sempat dipindahkan ke Balai Diklat PKN Gowa. Namun, sejak Agustus 2022 lalu, BPK Sulbar telah kembali berkantor di Mamuju.

Upaya pemulihan yang dilakukan bukan hanya sebatas pada perbaikan gedung kantor. Hal yang tak kalah penting adalah memulihkan trauma para pegawai dari musibah gempa. Kepala Perwakilan BPK Sulbar Hery Ridwan menceritakan, gempa saat itu terjadi pada Jumat (15/01/2021) sekitar pukul 02.28 WITA. Seluruh warga Mamuju tak terkecuali para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, berhamburan keluar meninggalkan

rumah/hunian masing-masing menuju tempat yang lebih tinggi untuk menghindari adanya potensi tsunami atau gempa susulan.

Pada saat itu, Kantor dan Rumah Jabatan BPK Sulbar yang berlokasi di tempat tinggi menjadi tempat pengungsian oleh warga sekitar dan bagi pegawai BPK Sulbar. Gempa mengakibatkan kerusakan pada struktur bangunan kantor serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional kantor, sehingga berdampak pada aktivitas kantor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pascagempa, aktivitas perkantoran BPK Sulbar dilakukan di tenda darurat.

"Kami memanfaatkan tenda, meja, kursi dan laptop yang ada untuk mendukung kegiatan kantor darurat sekaligus menjadi posko logistik kami. Kurang lebih sekitar 10 hari kami berkantor di kantor darurat," kata Hery kepada *Warta Pemeriksa*, awal Oktober.

Berdasarkan pertimbangan kondisi bangunan kantor yang

tidak memungkinkan untuk digunakan beraktivitas dan kondisi Mamuju pascagempa yang belum kondusif, BPK Sulbar kemudian mengajukan permohonan untuk berkantor sementara di Balai Diklat PKN Gowa. Sesuai dengan arahan pimpinan, BPK Sulbar mendapat persetujuan untuk berkantor sementara di Balai Diklat PKN Gowa, sejak 25 Januari 2021.

Beberapa menit setelah kejadian gempa, ujar Hery, fokus BPK Sulbar adalah memastikan keselamatan seluruh pegawai beserta keluarga. Pada saat itu, akses telepon maupun listrik sempat terputus dan terkendala di beberapa titik. Berbagai upaya kami lakukan untuk memastikan bahwa pegawai dan seluruh keluarganya dalam keadaan selamat. "Kami mendata satu per satu pegawai sambil terus berkoordinasi dengan mendirikan posko darurat. Alhamdulillah seluruh pegawai beserta keluarganya dalam keadaan selamat, meskipun ada beberapa yang cedera ringan," katanya.





**Pengalaman ini merupakan pengalaman berharga yang akan kami ingat selalu. Bukan mengingat dampak gempanya, tapi mengingat seberapa kuat kami bersama-sama untuk bangkit kembali.**



■ Kerusakan sarana kantor perwakilan.

Untuk memudahkan koordinasi, ditentukan titik kumpul para pegawai yaitu pada halaman kantor BPK, halaman rumah jabatan, dan halaman mess. "Kami menghimbau kepada seluruh pegawai agar berada pada tempat yang aman, untuk menghindari dampak dari gempa maupun adanya gempa susulan. Setelah seluruh pegawai teridentifikasi keberadaannya, kami kemudian mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Penyediaan makanan dan minuman kami upayakan untuk memenuhi kebutuhan darurat pegawai dan keluarganya," kata Hery mengisahkan.

Mengingat kondisi pasca gempa tidak kondusif, BPK Sulbar kemudian secara bertahap melakukan proses evakuasi kepada pegawai yang berdomisili di luar Mamuju. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat maupun udara dengan tujuan ke Makassar dan Palu. Sedangkan untuk pegawai yang berdomisili di Mamuju, BPK Sulbar menyediakan posko darurat dan dapur umum, dengan menyediakan kebutuhan pokok, minuman, perlengkapan mandi, selimut, perlengkapan bayi serta perlengkapan lainnya.

Pada masa tanggap darurat tersebut, ujar Hery, pihaknya memang berfokus kepada keselamatan pegawai beserta keluarga terlebih dahulu, dan pemenuhan kebutuh-

an logistik pegawai dan keluarga serta pembuatan posko darurat. Setelah hal tersebut terpenuhi, barulah dilakukan pengamanan atas aset-aset kantor dan pemulihan aktivitas perkantoran.

Dia mengatakan, musibah gempa bumi menimbulkan kerusakan pada gedung kantor, rumah jabatan, dan mess. Hasil pengamatan kami secara visual, kondisi gedung kantor pascagempa mengalami kerusakan pada beberapa struktur bangunan, kerusakan cukup parah pada atap, kerusakan pada dinding dan lantai di hampir setiap lantai. Hasil *assessment* Kementerian PUPR dengan mempertimbangkan kerusakan, direkomendasikan penggantian pada elemen non struktur dan disimpulkan bangunan gedung masuk kategori rusak berat.

### Program pemulihan

Hery menceritakan, tiga hari setelah musibah gempa, BPK Sulbar sudah mendirikan kantor darurat di halaman Rumah Jabatan. Dengan segala keterbatasan, kegiatan operasional kantor tetap dilakukan, khususnya persuratan, masih bisa berjalan walaupun belum optimal. Setelah persetujuan berkantor sementara di Balai Diklat PKN Gowa, BPK Sulbar kemudian membuat program prioritas pemulihan aktivitas perkantoran pascagempa.

Program pertama, BPK Sulbar memastikan seluruh pegawai sudah siap untuk melaksanakan kegiatan perkantoran.



■ Penyampaian bantuan Korpri BPK Peduli.

Hery mengatakan, pihaknya mengadakan kegiatan *trauma healing* bekerja sama dengan Employee Care Center (ECC) Biro Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dilakukan untuk mengurangi trauma pada pegawai pascagempa.

"Selain itu, penguatan psikologis pegawai melalui pengarahan-pengarahan kami lakukan, guna tetap menumbuhkan semangat dan motivasi pada pegawai untuk tetap bekerja dengan baik," ujar dia.

Setelah pemulihan trauma pegawai, BPK Sulbar melakukan inventarisasi atas barang milik negara yang masih dapat digunakan untuk dimobilisasi dari Gedung BPK Sulbar di Mamuju ke Kantor Sementara di Balai Diklat PKN Gowa. BPK Sulbar juga berkoordinasi dengan Biro Umum dan Biro TI untuk mempercepat pemulihan aktivitas perkantoran.

Ketiga, BPK Sulbar berkomunikasi secara aktif dengan pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Barat, bahwa BPK Sulbar berkantor sementara di Gowa, Sulawesi Selatan. "Namun demikian, kami dapat memastikan bahwa proses pelaksanaan tugas kami khususnya dalam bidang pemeriksaan tetap berjalan meskipun dalam pelaksanaannya mengalami sedikit penyesuaian, menyesuaikan dengan kondisi entitas pasca terjadinya gempa."

Koordinasi juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk

memastikan Gedung Kantor BPK Sulbar dapat segera diperbaiki. "Kelima, kami berkoordinasi dan melaporkan setiap perkembangan kantor pasca gempa pada pimpinan. Sekitar dua bulan pasca kami berkantor sementara, aktivitas perkantoran BPK Sulbar dapat dikatakan berjalan dengan baik dan pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan pun dapat kami laksanakan," kata dia.

Hery mengatakan, kondisi kantor BPK Sulbar saat ini telah selesai diperbaiki dan kegiatan kantor telah kembali berjalan normal. Terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2022 seluruh pegawai telah aktif berkantor pada Gedung Kantor BPK Sulbar di Mamuju. Pasca berkantor kembali di Mamuju, pihaknya lalu berkoordinasi dengan BPK Pusat dalam hal ini AKN VI dan Sekretaris Jenderal (Biro Umum, Biro TI maupun Biro Keuangan) guna percepatan pemulihan kembali kegiatan operasional perkantoran. Secara perlahan tapi pasti, BPK Sulbar pun telah melakukan perbaikan/renovasi dan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi, seperti renovasi ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), pembuatan ruang Perpustakaan, renovasi Ruang Kebugaran, rehabilitasi tempat ibadah (Masjid), dan pembuatan cafeintegritas serta taman yang

dilengkapi meja dan kursi untuk istirahat/bersantai para pegawai.

"Sehingga pascagempa, dapat kami katakan terdapat peningkatan atas fasilitas-fasilitas di Gedung Kantor BPK Sulbar. Semua itu kami lakukan dengan harapan memberikan kenyamanan kepada para pegawai dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan aktivitas perkantoran di Kantor BPK Sulbar, selain juga tentunya menghilangkan rasa trauma gempa ketika berada di gedung kantor," ucap dia.

### Mitigasi bencana

Dia menambahkan, BPK Sulbar sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memperkuat struktur bangunan. Hal ini mengingat kantor BPK Sulbar berada di wilayah yang rawan akan gempa bumi. Struktur bangunan yang baru mampu meminimalkan risiko yang terjadi akibat



■ Pendirian tenda darurat dan pengecekan kondisi gedung.



gempa. Selain itu, telah dibuat program mitigasi bencana berupa peta dan jalur evakuasi yang berada pada masing-masing lantai dan/ atau ruangan pada Gedung Kantor beserta lokasi titik kumpul.

Penataan ruangan juga diperhatikan agar memudahkan pegawai melakukan evakuasi apabila terjadi bencana dan mengurangi risiko cedera, termasuk pengamanan data pada server dan pengamanan aset menjadi evaluasi tersendiri.

“Selain itu kami juga telah membuat video tentang kesiapsiagaan bencana, serta apa yang harus dilakukan ketika ada bencana dan telah mensosialisasikannya dengan harapan para pegawai memiliki kesadaran serta kesiapan akan potensi bencana yang ada khususnya gempa bumi.”

Menurut Hery, hal yang tak kalah penting adalah menumbuhkan kesadaran sejak dini serta edukasi kepada para pegawai bahwa bencana bisa datang kapan pun. Sehingga sikap waspada tetap harus dijaga dan yang tidak kalah penting bagaimana bisa bersikap tenang ketika bencana datang.

“Pengalaman ini merupakan pengalaman berharga yang akan kami ingat selalu, bukan mengingat dampak gempanya, tapi mengingat seberapa kuat kami bersama-sama untuk bangkit kembali,” kata Hery.

Hery atas nama BPK Sulbar dan pribadi mengucapkan terima kasih



■ Pegawai BPK perwakilan Sulbar menempati Balai Diklat PKN Gowa sebagai kantor sementara.

yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan Keluarga Besar BPK RI baik di pusat maupun di daerah dan pihak-pihak terkait lainnya atas dukungan dan semangat moril yang diberikan pascagempa yang menimpa BPK Sulbar. Ia berterima kasih kepada Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, Pimpinan pemeriksaan keuangan negara VI/Anggota VI, Tortama KN VI, dan Sekretaris Jenderal BPK atas cepatnya respons yang diberikan, sehingga tidak lama setelah gempa terjadi, langsung dilakukan koordinasi dan diambil tindakan-tindakan penanganan pasca gempa.

“Kami juga berterima kasih kepada tetangga terdekat kami BPK Perwakilan Sulawesi Tengah,

BPK Perwakilan Gorontalo dan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan yang telah hadir membawa bantuan berupa tenda darurat, kebutuhan pokok, keperluan bayi dan balita, BBM, dan keperluan lain serta mengizinkan beberapa pegawai kami transit di Palu dan Makassar serta BPK Perwakilan Maluku yang telah berkunjung ke kantor sementara kami. Kami berterimakasih yang sebesar-besarnya pula kepada KORPRI BPK RI dan para pegawai BPK diseluruh Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada kami. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi kami dan telah kami salurkan kepada pegawai dan kepada masyarakat di lingkungan sekitar kami yang terdampak gempa,” kata dia.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Hery kepada Kepala Badan Diklat PKN dan Kepala Balai Diklat PKN Gowa, yang telah mengizinkan insan BPK Sulbar berkantor sementara di Balai Diklat PKN Gowa dan bertempat tinggal di wisma Balai Diklat Gowa. Ia bersyukur dan merasa terharu atas perhatian keluarga besar BPK RI.

“Terima kasih atas segala bantuan, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Kami juga berterima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pihak PT Wika Gedung, yang telah membantu dalam melakukan rehabilitasi kantor BPK Perwakilan Sulawesi Barat, sehingga gedung kami bisa ditempati kembali.” ●



■ Gedung Perwakilan Sulbar pasca renovasi.



## MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS



■ OLEH **GUNARWANTO**  
KEPALA BIRO SDM BPK

Untuk menanggulangi kasus-kasus korupsi, BPK membuat program Trilogi Pembangunan Integritas. Program ini diharapkan bisa menangkal praktik pelanggaran integritas oleh pegawai BPK dalam melaksanakan tugasnya.

**B**agi lembaga negara seperti BPK, soal integritas menjadi perhatian utama. Tugas BPK memeriksa keuangan negara tidak bisa tegak jika para pengelolanya tidak berintegritas. Oleh karena itu, sangat tepat jika BPK memiliki nilai dasar sebagai standar moral bagi insan BPK dalam bekerja, yaitu: integritas, independensi, dan profesionalisme.

Diakui, tidak mudah menjaga integritas. Banyak godaan terhadap pegawai BPK dalam melaksanakan tugasnya, terutama pemeriksaan. Terbukti, beberapa kali pemeriksa BPK tersangkut perkara korupsi berupa penerimaan gratifikasi, suap, mengatur temuan pemeriksaan, dan sebagainya.

Untuk menanggulangi kasus-kasus korupsi, BPK membuat program Trilogi Pembangunan Integritas. Program ini diharapkan bisa menangkal praktik pelanggaran integritas oleh pegawai BPK dalam melaksanakan tugasnya. Trilogi Pembangunan Integritas meliputi kegiatan pembangunan budaya integritas, pembangunan sistem integritas, dan penegakan hukum bagi pelanggar integritas.

### Hakekat integritas

Salah satu pilar dari Trilogi Pembangunan Integritas adalah pembangunan budaya integritas. Meliputi internalisasi pemahaman dan komitmen integritas kepada semua pihak di BPK, mulai pimpinan dan seluruh pegawai BPK, serta kepada pihak eksternal

untuk mendukung penegakan integritas di BPK. Jika semua pihak memahami dan menginternalisasi integritas, maka setiap tindakannya akan terjaga dari pelanggaran integritas.

Sesungguhnya apa hakikat integritas? Makna terdalam dari integritas adalah kejujuran. Jujur artinya sesuai dengan yang benar. Dalam kejujuran semua perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Seorang yang berintegritas tidak akan berbohong, tidak akan berbuat curang, tidak akan korupsi, tidak akan menyalahgunakan wewenang, tidak menyalahi aturan, tidak akan merugikan negara, dan sebagainya.

Dengan demikian, kalau ada orang jujur pasti akan dipercaya. Sebaliknya, orang yang tidak jujur maka tidak akan dipercaya. Lembaga yang tugas-tugasnya dilaksanakan oleh orang-orang jujur, maka lembaga tersebut akan dipercaya oleh masyarakat. Namun, jika sebaliknya, lembaga tersebut juga tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Pun dengan BPK, jika integritas menjadi mata hati setiap insan di dalamnya, lembaga ini akan dipercaya, dicintai, dan dihormati masyarakat.

Bagaimana membangun budaya integritas di BPK? Tidak mudah. Lebih mudah mendidik orang dari sebelumnya tidak paham pemeriksaan menjadi paham, lebih mudah melatih orang dari sebelumnya tidak tahu komputer menjadi mahir komputer. Integritas berkaitan dengan hati, sedang kepintaran berkaitan dengan ingatan dan pikiran.

Budaya integritas berasal dari dua kata, yaitu budaya dan integritas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian budaya adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan, sedang integritas artinya kejujuran. Dalam budaya integritas terbangun sikap dan perilaku jujur yang menjadi kebiasaan sehari-hari.

Membangun budaya integritas di BPK artinya membiasakan sikap dan perilaku jujur bagi insan BPK dalam kehidupan sehari-hari. Jika budaya integritas sudah terbangun, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, akan terbentuk karakter atau kepribadian integritas. Berikut beberapa gagasan yang dapat dilaksanakan untuk membangun budaya integritas.

### **Pendidikan integritas**

Pertama, melalui bidang pendidikan dan pelatihan, Badan Diklat bisa menyelenggarakan pola pembelajaran karakter integritas. Badiklat bisa menyusun kurikulum, silabus, dan mata diklat yang berkaitan dengan penguatan integritas. Sebagai contoh pembelajaran tentang filsafat, etika, kode etik, kejujuran, kebenaran, pendidikan anti korupsi, upaya mencegah dan memberantas korupsi, dan topik-topik lain yang bisa menguatkan integritas.

Materi-materi tersebut tidak terbatas dipelajari pada diklat yang dikhususkan untuk belajar tentang integritas (misal mata diklat Kode Etik BPK), namun pesan-pesan integritas dapat dimasukkan dalam setiap mata diklat. Seperti pepatah "makan apapun, minumnya teh botol". Diklat apapun, ada pesan integritas dalam materinya.

Belajar tentang komunikasi ada pesan tentang kejujuran, belajar tentang pemeriksaan harus ada pesan kejujuran. Belajar tentang kepemimpinan ada pesan tentang kejujuran. Belajar tentang teknologi ada pesan kejujuran. Pesan-pesan kejujuran selalu hadir dalam setiap pembahasan di kelas, *coaching* dan *mentoring*, maupun praktik kerja (*on the job training*).

Badiklat juga harus menanamkan kejujuran dalam ujian. Bagi peserta diklat yang tidak

jujur dalam mengerjakan ujian, misalnya menyontek, harus dipastikan tidak lulus. Tidak ada toleransi bagi peserta diklat yang tidak jujur.

Penanaman karakter integritas melalui diklat tidak hanya untuk pegawai baru, namun juga bagi pegawai lama BPK. Pegawai baru penting mendapat materi integritas sebagai proses awal menjalani penanaman karakter integritas. Nilai integritas menjadi landasan moral pegawai baru dalam menjalankan tugas sebagai pegawai BPK ke depan.

Bagi pegawai lama, pemberian materi integritas berfungsi untuk mengingatkan dan menguatkan kembali saat menjalani diklat. Sesungguhnya, integritas orang bisa naik dan turun yang dipengaruhi oleh banyak hal. Kadang kuat dan kadang lemah. Dalam diklat itulah bagi yang sudah kuat dibuat lebih kuat lagi, bagi yang sedang lemah dapat dikuatkan kembali. Singkat kata, diklat memegang peran penting dalam penanaman nilai integritas insan BPK.

### **Pendekatan agama dan kebangsaan**

Kedua, pembangunan budaya integritas bisa dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab membina dan mengembangkan kompetensi

pegawai, biro ini bisa membuat kegiatan pembinaan dan penguatan integritas bagi pegawai. Sejatinya, salah satu kompetensi yang harus dimiliki pegawai BPK adalah kompetensi moral integritas.

Pembinaan budaya integritas bisa melalui pendekatan keagamaan dan pendekatan kebangsaan. Pendekatan keagamaan dilakukan melalui penanaman nilai-nilai agama tentang kejujuran. Sedang pendekatan kebangsaan melalui penanaman nilai-nilai nasionalisme.

Melalui pendekatan keagamaan, para pegawai BPK disadarkan dengan ajaran kejujuran sesuai dengan agama masing-masing. Sebagai orang berketuhanan upaya ini diharapkan bisa mengetuk hati terdalam para pegawai sehingga integritasnya makin kuat. Penyadaran melalui nilai agama diyakini paling efektif dapat menguatkan integritas.



**Jika budaya integritas sudah terbangun, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, maka akan terbentuk karakter atau kepribadian integritas.**



**Sifat serakah membuat orang selalu merasa kekurangan sehingga terdorong menghalalkan segala cara untuk memenuhi kekurangannya. Demikian pula dengan kebutuhan, setiap orang selalu merasa kebutuhannya belum tercukupi.**

Biro SDM bisa bekerja sama dengan unit kerohanian dengan cara mengundang ahli agama untuk menjelaskan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Topik apapun yang dibahas dalam ceramah keagamaan pada saat sholat Jumat, pengajian, kebaktian, peringatan hari besar keagamaan, dan kegiatan keagamaan lainnya, hendaknya selalu diselipkan pesan-pesan nilai integritas.

Melalui pendekatan kebangsaan kita disadarkan bahwa negara ini didirikan oleh pendiri negara dengan susah payah dan penuh perjuangan dengan tetesan darah dan air mata, juga taruhan nyawa melawan penjajah. Pendiri bangsa mencita-citakan negara Indonesia yang merdeka, serta masyarakatnya adil dan makmur. Kesadaran tersebut dapat menumbuhkan rasa malu dan bersalah kepada para pendahulu jika sebagai anak bangsa melakukan perbuatan curang seperti korupsi. Oleh karena itu, kita akan berupaya menjauhi perbuatan yang melawan integritas.

Ketiga, melalui pendekatan agama, para pegawai perlu diberikan pemahaman tentang hidup sederhana dan menjauhi keserakahan. Dua hal ini penting karena dalam teori yang membahas tentang faktor pendorong orang berbuat korupsi, antara lain karena serakah (*greed*) dan kebutuhan (*need*). Sifat serakah membuat orang selalu merasa kekurangan sehingga terdorong menghalalkan segala cara untuk memenuhi kekurangannya. Demikian pula dengan kebutuhan, setiap orang selalu merasa kebutuhannya belum tercukupi. Sudah punya rumah, ingin rumah yang lebih baik lagi, ingin yang lebih mewah, dan sebagainya. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan tanpa melihat kemampuannya dapat menjerumuskan orang melakukan korupsi. Dorongan seperti ini harus dikendalikan karena iming-iming konsumerisme setiap saat akan menggoda orang sehingga selalu merasa butuh.

Keempat, semua satuan kerja bisa mengondisikan tata hubungan antar pegawai untuk saling menguatkan dan mengingatkan. Jika ada pegawai yang menghadapi kesulitan dalam kehidupannya, bisa dibantu untuk mengatasi kesulitannya, misal terkait permasalahan keluarga, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Bantuan tersebut dapat mencegah yang bersangkutan salah arah melakukan perbuatan yang melanggar integritas.

Kedekatan antar pegawai juga untuk membiasakan sikap peduli saling mengingatkan agar tidak terjerumus pada perilaku dan perbuatan anti integritas. Jika masing-masing pegawai terbiasa saling membantu, saling menguatkan, dan saling mengingatkan maka akan tumbuh jiwa korsa yang kuat untuk bersama-sama melawan tindakan anti integritas.

Kelima, setiap atasan atau senior bisa memberi contoh perilaku berintegritas. Salah satu peran penting seorang atasan adalah memimpin dengan memberi contoh. Jika atasan atau senior selalu menampilkan dirinya memegang teguh integritas, seperti selalu jujur baik perkataan dan perbuatannya, maka bawahan atau junior akan mudah mempercayai dan menyontoh.

Sejak awal 2022, di BPK terdapat sekitar 1.400 pegawai baru yang penempatannya tersebar di seluruh satuan kerja, terutama di kantor-kantor perwakilan BPK. Sebagian besar di antara mereka akan menjadi pemeriksa. Sudah semestinya atasan atau senior bertanggung jawab untuk selalu membimbing dan membina mereka dengan nilai-nilai integritas.

Mereka adalah pemegang masa depan BPK. Melalui contoh yang baik dari atasan, dapat menguatkan pondasi nilai moral integritas para pegawai baru. Jika integritas kuat, nilai dasar yang lain, yaitu independensi dan profesionalisme juga akan kuat.



## Pesan integritas

Keenam, upaya lain yang bisa digunakan sebagai ikhtiar menumbuhkan budaya integritas adalah melalui pesan-pesan integritas yang ditulis pada pamflet, banner, saluran intranet, dan lain sebagainya. Saat ini sudah ada banner yang dipasang di beberapa tempat di lingkungan gedung kantor. Misalnya di pintu masuk ruangan, di dalam ruangan rapat, di kantin, dan sebagainya.

Kegiatan ini perlu diteruskan dan ditingkatkan. Pesan-pesan integritas dengan kata-kata yang menyentuh hati dan menggugah kesadaran dapat menguatkan integritas. Nampaknya upaya seperti ini sangat sederhana, bahkan diragukan efeknya. Namun sesungguhnya tidak sia-sia, bahkan dapat mencegah seseorang berbuat curang, korupsi, berbohong, dan sebagainya.

Dalam kumpulan cerita pendek yang diterbitkan oleh suatu penerbit, ada cerita menyentuh tentang auditor. Suatu saat, ia mengalami kesulitan keuangan. Ia tergoda mengatur temuan pemeriksaan dengan imbalan sejumlah uang dari pejabat yang diperiksa.

Menjelang malam, selagi merancang pertemuan dengan pejabat tersebut. Tiba-tiba anak perempuan yang sedang belajar di sampingnya bertanya padanya.

"Bunda, ini ada PR, apa sih artinya integritas. Jawabannya: jujur, curang, dan bohong. Pilih yang mana?"

Auditor tersebut kaget seperti tersambar petir. Ia terhenyak dan tiba-tiba memeluk anaknya dengan erat. Lama dia memandang wajah anaknya yang masih kelas lima sekolah dasar. Anak kecil itu pun tertegun melihat ibunya lama menatap dan mengusap-usap wajahnya. Anak itu melihat bibir ibunya bergetar dan air mata ibunya bercucuran.

"Bunda kenapa?" tanya anaknya lirih dengan bingung.

"Anakku sayang..., integritas artinya jujur. Jujur itu tidak boleh bohong. Tidak boleh curang. Kakak harus jadi anak yang berintegritas ya," kata ibunya dengan suara pelan dan bergetar.

"Iya, Bunda," anak itu mengangguk.

Sambil masih meneteskan air mata, auditor itu mengambil telepon selulernya. Ia menulis pesan kepada pejabat yang berjanji untuk bertemu.

Ia menulis, "Mohon maaf Pak, besok saya tidak bisa bertemu. Hasil pemeriksaan tetap seperti semula dan sudah saya serahkan kepada atasan. Terima kasih."

Ia menarik napas panjang. Syukurlah, Tuhan masih melindungiku melalui anakku. Hampir saja aku terjerumus pada tindakan yang salah, melanggar kejujuran. Menggadaikan integritasku.

Tidak tahu apakah cerita dalam cerpen tersebut fiktif atau berasal dari kisah nyata. Namun, cerita tersebut bisa jadi contoh bahwa hidayah atau kesadaran bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Bisa dari anak kecil, dari keluarga, masukan kawan, dari atasan, bawahan, bahkan dari pesan-pesan yang ada di banner, di tembok-tembok kantor, dan lain sebagainya.

## Jujur jadi budaya

Membangun budaya integritas di BPK artinya membiasakan para pegawai BPK bersikap dan berperilaku jujur dalam setiap pekerjaannya. Jujur menjadi budaya insan BPK. Jujur menjadi karakter insan BPK. Supaya timbul karakter, maka pemahaman tentang integritas harus terus menerus disampaikan dengan berbagai cara sehingga diyakini dan tertanam dalam hati, serta terwujud dalam perbuatan.

Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berpesan bahwa orang yang suka berkata jujur akan mendapat tiga hal, yaitu: kepercayaan, rasa cinta, dan rasa hormat. Jika insan BPK bisa menjaga integritas, BPK juga akan mendapat kepercayaan, rasa cinta, dan rasa hormat dari seluruh masyarakat Indonesia. Semoga! ●

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email [wartapemeriksa@bpk.go.id](mailto:wartapemeriksa@bpk.go.id) dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.



**1**  
Acara Tasyakuran dan Apresiasi Rangkaian Kegiatan SAI20 dihadiri oleh Pimpinan BPK RI, 16 September 2022.



**2-3**  
Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, melaksanakan pertemuan bilateral dengan President Board of Audit of Japan, Morita Yuji, di Tokyo, Jepang, 21 September 2022.

**4-5**  
Pengarahan dan Penyerahan LHP Investigasi dihadiri oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono di BPK Perwakilan Lampung, 19 September 2022.

**6**  
Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing menghadiri Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, 8 September 2022.







7-9

Penyematan *Wings Kehormatan TNI AU* kepada Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana dan Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Hendra Susanto, 18 Agustus 2022.



10

Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur dihadiri Plt Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Isma Yatun, 12 September 2022.

11

Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang menghadiri Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Utara, 26 September 2022.

12

Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Bali dihadiri Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang, 29-30 September 2022.

13

Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Hendra Susanto menghadiri Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Sumatera Selatan, 6 September 2022.

14

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mewakili BPK RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, 7 September 2022.







## Kuis

Dalam majalah *Warta Pemeriksa* edisi 8 disebutkan bahwa BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tahun 2021. Di entitas mana saja pemeriksaan tersebut dilakukan?



Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email [wartapemeriksa@bpk.go.id](mailto:wartapemeriksa@bpk.go.id) dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

# PANDUAN ISOLASI MANDIRI

CEGAH PENULARAN COVID-19



## SEGERA KE RUMAH SAKIT

Demam  
terus-menerus

Muntah  
terus-menerus

Sesak  
nafas

Nyeri  
dada

Gangguan  
kesadaran

Diare  
terus-menerus



## DURASI ISOMAN

Maksimal 10 hari sejak bergejala  
3 hari bebas gejala demam  
dan gangguan pernapasan

Gejala lebih dari 10 hari?  
Isolasi dilanjutkan hingga  
gejala hilang + 3 hari bebas gejala

## LAKUKAN KOMUNIKASI AKTIF TERKAIT KONDISI KESEHATAN ANDA KEPADA



Atasan  
langsung



Dokter



Biro SDM



SAI20 is initiated during the Indonesia G20 Presidency 2022 as an engagement group of G20. It is a forum for the Supreme Audit Institutions of G20 member countries to meet and discuss matters relevant to SAIs, and identify insights gained from their assurance activities. SAI20 is built in the spirit of INTOSAI-P12 on Value and Benefits of SAIs; making a difference to the lives of citizens.



### PRIORITY ISSUES for 2022

- 1  
Accelerating Economic Recovery
- 2  
Supporting the Sustainable Development Goals (SDGs)

## OBJECTIVES

Promote collaboration among 1 SAIs in G20 countries and other 2 stakeholders to contribute oversight, insight and foresight to foster accountable economic resilient governance.

Develop a platform for strengthening SAI's role as a partner of G20 member states in responding to global issues.

## INCLUSIVENESS

SAI20 consistently explores opportunities for inclusiveness and collaboration to support resilient governance and achieve the 2030 agenda. SAI20 also intensively manage the dialogue and international cooperation to come up with best practices and recommendations to solve the problems presented by the current challenging global situation. To do so SAI20 is committed to echoing and voicing the initiatives of the INTOSAI Community.

## SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



## ACTIVITIES IN 2022

- Bali**  
26-27 January

● **SAI20 Technical Meeting**
- Labuan Bajo, NTT**  
17 June

● **SAI20 Seminar**
- Labuan Bajo, NTT**  
21-22 June

● **SAI20 Senior Officials Meeting**
- Bali**  
29-30 August

● **SAI20 Summit**

### OUTPUT

- Agreed issue note
  - Draft RoP
- Insight from stakeholders on SAI20 priority issues
- Endorsed RoP for adoption
  - Zero Draft of SAI20 Communique
- Adopted RoP
  - Communique